



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023





GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala atas limpahan Rahmat, Petunjuk dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat disusun dan disampaikan kepada Pemerintah *tepat waktu* yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan disampaikan melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

Gubernur selaku Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai amanah pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan;
4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah merupakan laporan atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang dicapai selama tahun 2023. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja keras sehingga tercapai keberhasilan di berbagai bidang. Keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan demikian capaian kinerja selama Tahun 2023 merupakan keberhasilan seluruh stakeholder sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja Eksekutif, Legislatif, masyarakat dan dunia usaha.

Sumber Informasi dan Data capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan untuk data Capaian Kinerja Makro diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan telah direviu oleh Tim APIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai amanah PP Nomor 13 Tahun 2019 pasal 10 ayat (93) bahwa data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat daerah yang bersangkutan.

Melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas bimbingan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan pemerintahan untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


BAHTIAR BAHARUDDIN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	I-2
b. Data Geografis Wilayah	I-2
c. Jumlah Penduduk	I-4
d. Jumlah Kab/Kota.....	I-5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I-6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-9
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-12
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-22
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-27
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-44
e. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	I-48
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-50
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ...	II-1
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci (Keluaran)	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (Hasil)	II-16

2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-57
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-60
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III-1
2.	Gambaran Umum Pelaksanaan tugas Pembantuan	III-1
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-2
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi	III-2
3.2	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten	III-17
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1	Bidang Urusan Pendidikan	IV-1
4.2	Bidang Urusan Kesehatan	IV-6
4.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV-14
4.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-17
4.5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	IV-19
4.6	Bidang Urusan Sosial	IV-23
4.7	Program dan Kegiatan	IV-28
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2023	I-4
Tabel 1.2 Luas wilayah dan jumlah pulau Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	I-5
Tabel 1.3 ASN Pemprov Sulsel Berdasarkan Eselon Tahun 2021	I-9
Tabel 1.4 ASN Pemprov Sulsel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	I-9
Tabel 1.5 Realisasi Pendapatan	I-9
Tabel 1.6 Realisasi Belanja	I-10
Tabel 1.7 Realisasi Pembiayaan	I-11
Tabel 1.8 Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023	I-22
Tabel 1.9 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.....	I-23
Tabel 1.10 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023.....	I-24
Tabel 1.11 Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.....	I-25
Tabel 1.12 Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023.....	I-29
Tabel 1.13 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2023	I-32
Tabel 1.14 Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023	I-43
Tabel 1.15 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	I-48
Tabel 1.16 Revisi Target Indikator Kinerja Tahun 2021	I-43
Tabel 1.17 Penjelasan Atas Perubahan Target Indikator Kinerja	I-44
Tabel 1.18 Indikator Kinerja Utama.....	I-49
Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro Capaian Indikator Makro	II-1
Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-60
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	II-60
Tabel 2.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	II-62
Tabel 2.5 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	II-62
Tabel 2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir	II-63

Tabel 2.7	Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran	II-66
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan	II-67
Tabel 2.9	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	II-68
Tabel 2.10	Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir	II-68
Tabel 2.11	Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional	II-69
Tabel 2.12	Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional	II-74
Tabel 2.13	Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran	II-75
Tabel 4.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM	IV-2
Tabel 4.2	Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan	IV-2
Tabel 4.3	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tiap Tahun.....	IV-3
Tabel 4.4	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	IV-4
Tabel 4.5	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-4
Tabel 4.6	Capaian Indikator Kinerja.....	IV-6
Tabel 4.7	Dukungan Logistik Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana.....	IV-7
Tabel 4.8	Capaian Indikator Kinerja.....	IV-8
Tabel 4.9	Tempat Wadah Limbah Infeksius untuk Mencegah Penularan.....	IV-9
Tabel 4.10	Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan	IV-10
Tabel 4.11	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Provinsi.....	IV-11
Tabel 4.12	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	IV-11
Tabel 4.13	Target SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-14
Tabel 4.14	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-14
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-15
Tabel 4.16	Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-15
Tabel 4.17	Capaian Target SPM Perumahan Rakyat.....	IV-17
Tabel 4.18	Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-19
Tabel 4.19	Realisasi Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....	IV-19
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2023.....	IV-20
Tabel 4.21	Tingkatan Pendidikan Status PNS	IV-20
Tabel 4.22	Kepangkatan/Golongan	IV-21

Tabel 4.23 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial	IV-23
Tabel 4.24 Realisasi Capaian Bidang Urusan Sosial	IV-24
Tabel 4.25 Anggaran, Realisasi Belanja dan Realisasi Fisik Bidang Urusan Sosial	IV-25
Tabel 4.26 Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM di Dinas Sosial	IV-26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan	I-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata Kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1(satu) tahun anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian akuntabilitas Pemerintah Daerah, Tugas Pembantuan dan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Menteri. Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD dan telah diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa LPPD disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kerja. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditahun berikutnya.

a. Undang Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan mengacu pada aturan perundang-undangan dengan Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1960, yang merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah, yang berkedudukan di Kota Makassar (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara RI nomor 2102). Undang- undang tersebut di atas, telah diubah dengan Undang–Undang Nomor2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun1960tentang pembentukandaerahTingkatI SulawesiUtara, Tengah dan daerah TingkatI Sulawesi Selatan, Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068)

b. Data Geografis Wilayah

Provinsi Sulawesi selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu wilayah yang mempunyai lokasi strategis ditengah- tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah mencapai 46.717,48 Km persegi.

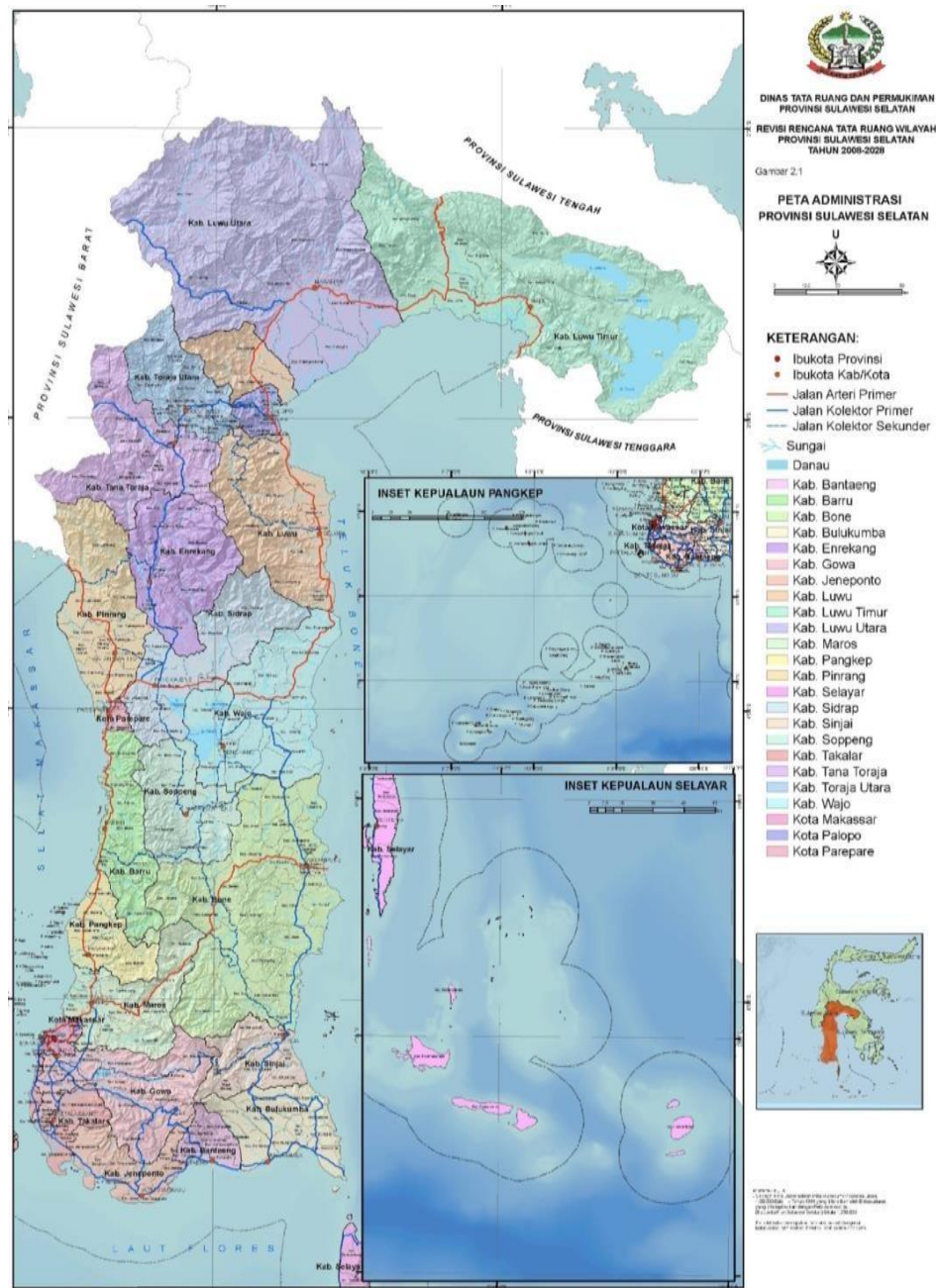
Secara geografis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0°12'-8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36'Bujur Timur yang berbatasan dengan :

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Karimata.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan



c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan semester II yang publish pada awal Tahun 2023 Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebanyak **9.400.283** jiwa.

Dari tabel di bawah terlihat penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.661.621 jiwa atau 49,6% dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.738.662 jiwa atau 50,4%. Daerah yang berpenduduk terbesar adalah Kota Makassar sebanyak 1.474.393 jiwa atau sebesar 15,7%, menyusul Kabupaten Bone dengan jumlah penduduk sebesar 820.510 jiwa atau 8,7% dan Kabupaten Gowa sebesar 799.999 jiwa atau 8,5%, sedangkan penduduk yang jumlahnya terendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 142.100 jiwa atau sebesar 1,5%.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2023

NO.	KAB/KOTA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JIWA	%
		JIWA	%	JIWA	%		
1	KEPULAUAN SELAYAR	69.907	0,7	72.193	0,8	142.100	1,5
2	BULUKUMBA	230.557	2,5	241.131	2,6	471.688	5,0
3	BANTAENG	104.602	1,1	107.021	1,1	211.623	2,3
4	JENEPONTO	207.496	2,2	212.627	2,3	420.123	4,5
5	TAKALAR	159.339	1,7	166.705	1,8	326.044	3,5
6	GOWA	396.130	4,2	403.869	4,3	799.999	8,5
7	SINJAI	135.661	1,4	137.898	1,5	273.559	2,9
8	BONE	400.508	4,3	420.002	4,5	820.510	8,7
9	MAROS	198.708	2,1	200.158	2,1	398.866	4,2
10	PANGKAJENE KEPULAUAN	175.700	1,9	182.146	1,9	357.846	3,8
11	BARRU	95.571	1,0	98.972	1,1	194.543	2,1
12	SOPPENG	116.455	1,2	124.500	1,3	240.955	2,6
13	WAJO	198.382	2,1	209.491	2,2	407.873	4,3
14	SIDENRENG RAPPANG	160.986	1,7	165.344	1,8	326.330	3,5
15	PINRANG	206.252	2,2	211.680	2,3	417.932	4,4
16	ENREKANG	117.519	1,3	113.782	1,2	231.301	2,5
17	LUWU	191.523	2,0	189.156	2,0	380.679	4,0
18	TANA TORAJA	132.284	1,4	125.617	1,3	257.901	2,7
19	LUWU UTARA	168.133	1,8	164.994	1,8	333.127	3,5
20	LUWU TIMUR	161.542	1,7	151.862	1,6	313.404	3,3
21	TORAJA UTARA	133.529	1,4	128.123	1,4	261.652	2,8
22	KOTA MAKASSAR	732.391	7,8	742.002	7,9	1.474.393	15,7
23	KOTA PAREPARE	79.753	0,8	80.556	0,9	160.309	1,7

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

NO.	KAB/KOTA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
24	KOTA PALOPO	88.693	0,9	88.833	0,9	177.526	1,9
	PROV. SULAWESI SELATAN	4.661.621	49,6	4.738.662	50,5	9.400.282	100

Data Disdukcapil Prov.Sulsel 2023

d. Jumlah Kab/Kota

Secara administrative Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dalam 21 wilayah Kabupaten ,dan 3 wilayah kota dengan total luas wilayah yaitu 46.717,48 km persegi yang terdiri dari 311 kecamatan dan 2255 desa/kelurahan. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Luwu Utara dengan Luas±7.502,58km persegi, menyusul Kabupaten Luwu Timur dengan luas±6.944,88 km persegi, Kabupaten Bone dengan luas ±4.559,00km. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 314 pulau. Kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 131 gugusan pulau.

Tabel 1.2
Luas wilayah dan jumlah pulau
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

NO.	KAB/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH PULAU	LUAS (km ² /sq.km)
1	KEPULAUAN SELAYAR	BENTENG	131	1.357,03
2	BULUKUMBA	BULUKUMBA	5	1.284,63
3	BANTAENG	BANTAENG	2	395,83
4	JENEPONTO	BONTOSUNGGU	1	706,52
5	TAKALAR	PATTALLASSANG	9	566,61
6	GOWA	SUNGGUMINASA	0	1.883,32
7	SINJAI	SINJAI	10	798,96
8	MAROS	MAROS	0	1.619,12
9	PANGKAJENE KEPULAUAN	PANGKAJENE	115	1.132,08
10	BARRU	BARRU	13	1.174,71
11	BONE	WATAMPONE	1	4.559,00
12	SOPPENG	WATANGSOPPENG	0	1.557,00
13	WAJO	SENGKANG	0	2.504,06
14	SIDRAP	RAPPANG	0	1.883,23
15	PINRANG	PINRANG	3	1.961,67
16	ENREKANG	ENREKANG	0	1.784,93
17	LUWU	BELOPA	0	3.343,97
18	TANA TORAJA	MAKALE	0	1.990,22
19	LUWU UTARA	MASAMBA	0	7.502,58
20	LUWU TIMUR	MALILI	11	6.944,88
21	TORAJA UTARA	RANTEPAO	0	1.215,55
22	KOTA MAKASSAR	MAKASSAR	12	199,36

NO.	KAB/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH PULAU	LUAS (km ² /sq.km)
23	KOTA PAREPARE	PAREPARE	0	99,33
24	KOTA PALOPO	PALOPO	1	252,99
	PROV. SULAWESI SELATAN	TOTAL	314	46.717,48

Data BPS Sulsel 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri 7 Staf Ahli Gubernur, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 7 Biro pada Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 25 Dinas, 8 Badan dan 2 Rumah Sakit dengan rincian :

I. Sekretariat Daerah

- a. Asisten Pemerintahan
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 2. Biro Kesejahteraan Rakyat
 3. Biro Hukum
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa
- c. Asisten Administrasi
 1. Biro Organisasi
 2. Biro Umum
 3. Biro Administrasi Pimpinan

II. Sekretariat DPRD

III. Inspektorat Daerah

IV. Staf Ahli Gubernur

1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pemerintahan
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Hukum
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sub Bidang Ekonomi
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sub Bidang Pembangunan

5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sub Bidang Keuangan
6. Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
7. Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Sub Bidang Keagamaan

V. Dinas

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
4. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
18. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23. Dinas Energi Sumber Daya Mineral
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VI. BADAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian Daerah

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Badan Penghubung Daerah

VII. RUMAH SAKIT

1. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
2. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

Sebagai kekuatan organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat memberikan kontribusi bagi kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dalam mencapai target dan tujuan yang di tetapkan, maka untuk jumlah pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun **2023** sebesar **21.043** orang dengan rincian penggolongan sebagai berikut :

1. **Pejabat Struktural : 1.055** orang, dengan rincian
 - a. Eselon I–B sebanyak 0 orang atau 0,00%
 - b. Eselon II-A sebanyak 43 orang atau 4,07%
 - c. Eselon II-B sebanyak 9 orang atau 0,85 %
 - d. Eselon III-A sebanyak 180 orang atau 17,06 %
 - e. Eselon III-B sebanyak 184 orang atau 17,44 %
 - f. Eselon IV-A sebanyak 635 orang atau 60,18 %
 - g. Eselon IV-B sebanyak 4 orang atau 0,37% %

2. **Kualifikasi Pendidikan :**
 - a. SD sebanyak 39 orang atau 0,18 %
 - b. SMP sebanyak 56 orang atau 0,26 %
 - c. SMA sebanyak 1.689 orang atau 8,02 %
 - d. D1 sebanyak 16 orang atau 0,07 %
 - e. D2 sebanyak 46 orang atau 0,21%
 - f. D3 sebanyak 898 orang atau 4,26 %
 - g. S1/D4 sebanyak 14.157 orang atau 67,27 %
 - h. S2 sebanyak 4.055 orang atau 19,27 %
 - i. S3 sebanyak 87 orang atau 0,41 %

3. Jumlah PNS Fungsional (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) sebanyak 2.322 orang.
4. Jumlah PNS (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) sebanyak 7.963 orang.

**Tabel 1.3
ASN Pemprov Sulsel Berdasarkan
Eselon Tahun 2023**

PNS Tahun	Ess. I	%	Ess. II	%	Ess. III	%	Ess. IV	%	Jumlah
2023	-	0	52	4,92	364	34,50	639	60,56	1.055

Data BKD Prov. Sulsel Tahun 2023

**Tabel 1.4
ASN Pemprov Sulsel
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

PNS TAHUN	TINGKAT PENDIDIKAN								
	SD	SLTP	SLTA	D.1	D.2	D.3	D.4/S1	S.2	S.3
2023	39	56	1689	16	46	898	14.157	4.055	87
%	0,18	0,26	8,02	0,07	0,21	4,26	67,27	19,27	0,41

Data BKD Prov. Sulsel Tahun 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan

Besaran pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data sementara yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan realisasi sebesar **Rp. 9.529.048.625.670,16** yang semula di anggarkan setelah perubahan sebesar **Rp. 10.156.734.331.527,00** atau **93.82%** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.5
Realisasi Pendapatan**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
PENDAPATAN DAERAH	10.156.734.331.527,00	9.529.048.625.670,16	93,82
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.751.863.972.794,00	5.183.909.557.070,16	90,13
Pendapatan Pajak Daerah	4.956.099.690.090,00	4.643.444.800.691,78	93,69
Pendapatan Retribusi Daerah	41.235.638.951,00	43.691.813.727,78	105,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan	134.603.389.662,00	134.625.075.430,00	100,02

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	619.925.254.091,00	362.147.867.220,60	58,42
PENDAPATAN TRANSFER	4.393.247.953.053,00	4.332.408.701.241,00	98,62
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	4.321.775.209.053,00	4.260.935.957.241,00	98,59
Dana Bagi Hasil (DBH)	314.133.289.053,00	300.683.356.808,00	95,72
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.525.244.049.000,00	2.528.731.264.500,00	100,14
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	314.693.468.000,00	266.596.196.619,00	84,72
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.167.704.403.000,00	1.164.925.139.314,00	99,76
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	71.472.744.000,00	71.472.744.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah (DID)	71.472.744.000,00	71.472.744.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.622.405.680,00	12.730.367.359,00	109,53
Pendapatan Hibah	7.837.405.680,00	8.374.025.998,00	106,85
Pendapatan Dana darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	3.785.000.000,00	4.356.341.361,00	115,09
Jumlah	10.156.734.331.527,00	9.529.048.625.670,16	93,82

2. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Besaran Belanja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data sementara yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan realisasi sebesar **Rp. 9.484.932.654.738,40** yang semula di anggarkan setelah perubahan sebesar **Rp. 10.139.793.942.365,00** atau **93,54%** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.6
Realisasi Belanja**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
BELANJA DAERAH	10.139.793.942.365,00	9.484.932.654.738,40	93,54
BELANJA OPERASI	6.278.204.019.918,00	5.878.274.978.127,80	93,63

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
Belanja Pegawai	3.375.853.679.618,00	3.334.595.367.224,00	98,78
Belanja Barang dan Jasa	2.413.261.908.689,00	2.136.800.929.402,80	88,54
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	22.400.000.000,00	19.089.436.330,00	85,22
Belanja Hibah	465.138.431.611,00	386.319.640.671,00	83,05
Belanja Bantuan Sosial	1.550.000.000,00	1.469.604.500,00	94,81
BELANJA MODAL	1.140.914.709.142,00	951.163.583.896,39	83,37
Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	421.128.356.932,00	340.217.620.905,72	80,79
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	360.640.414.792,00	285.768.764.039,67	79,24
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.653.725.694,00	268.004.093.131,00	89,14
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	54.205.388.724,00	54.142.534.370,00	99,88
Belanja Modal - Aset Lainnya	4.286.823.000,00	3.030.571.450,00	70,70
BELANJA BLUD	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	18.696.386.278,00	6.386.615.620,00	34,16
Belanja Tidak Terduga	18.696.386.278,00	6.386.615.620,00	34,16
BELANJA TRANSFER	2.701.978.827.027,00	2.649.107.477.094,21	98,04
Bagi Hasil Pajak	2.365.358.127.086,00	2.313.492.156.071,71	97,81
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	336.620.699.941,00	335.615.321.022,50	99,70
Jumlah	10.139.793.942.365,00	9.484.932.654.738,40	93,54

3. Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Besaran Pembiayaan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data sementara yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan realisasi sebesar **Rp. 16.818.310.958,49** yang semula di anggarakan setelah perubahan sebesar Rp. **0,00** atau **0,00%** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.7
Realisasi Pembiayaan**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
PEMBIAYAAN	0,00	(16.818.310.958,49)	0,00
PENERIMAAN DAERAH	119.559.610.838,00	119.559.610.837,51	100.00
Penggunaan SILPA	119.559.610.838,00	119.559.610.837,51	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0.00
Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	0,00	0,00	0.00
Jumlah	119.559.610.838,00	119.559.610.837,51	100.00
PENGELUARAN DAERAH	136.500.000.000,00	136.377.921.796,00	99,91
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	2.500.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	2.500.000.000,00	133.877.921.796,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	134.000.000.000,00	136.377.921.796,00	99,91
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	(16.818.310.958,49)	0,00
Jumlah	136.500.000.000,00	136.377.921.796,00	99,91
Pembiayaan neto	(16.940.389.162,00)	2.500.000.000,00	99,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	27.297.659.973,27	0,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan hasil identifikasi beberapa factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2023, khususnya yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan baik berupa layanan dasar maupun penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. (Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah :

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM),
- b) Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam

pendidikan Khusus (SPM),

- c) Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
- d) Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama,
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
- f) Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.

2. Kesehatan

- a) Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
- b) Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
- c) Masih rendahnya cakupan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani.
- d) Rendahnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
- e) Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
- f) Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Bayi
- g) Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Ibu hamil
- h) Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Nifas
- i) Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita
- j) Masih rendahnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin.
- k) Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
- l) Kurangnya sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah
- m) terisolir dan pulau-pulau kecil;
- n) Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
- o) Masih tingginya prevalensi angka stunting

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Masih kurangnya proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik.
- b) Masih rendahnya Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter).
- c) Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota;
- d) Masih rendahnya progres revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota, sertamasih terbatasnya rencana rinci tata ruang yang telah disusun
- e) Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
- f) Belum optimalnya pengembangan basis data penataan ruang dalam skala Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

- a) Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata
- b) Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi
- c) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan
- d) Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan Kawasan permukiman.
- e) Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
- b) Penegakan PERDA belum optimal

6. Sosial

- (a) Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun belum optimal.
- (b) Masih minimnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
- (c) Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
- (d) Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Basis
- (e) Data Terpadu (BDT) yang belum optimal

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a) Tingginya Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
- b) Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB)
- c) Rendahnya besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
- d) Masih rendahnya tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja.
- e) Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
- f) Tingginya pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Pelembagaan PUG 7 prasyarat PUG pada Lembaga Pemerintah belum optimal
- b) Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
- c) Layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga/organisasi masyarakat belum terstandarisasi

- d) Ketersediaan data dan informasi gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota secara kontinyu dan tervalidasi belum terbangun

3. Pangan

- a) Masih rendahnya ketersediaan pangan utama (Beras, jagung dan kedelai).
- b) Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
- b) Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
- c) Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.
- d) Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.

4. Pertanian

- a) Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara.
- b) Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan kurangnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan perencanaan, serta belum dilaksanakannya pemantauan terhadap penerbitan ijin penetapan lokasi;
- c) Belum optimalnya jangkauan dan pemahaman Reforma Agraria pada pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

5. Lingkungan Hidup

- a) Masih rendahnya sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi
- b) Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
- c) Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan
- d) Kemampuan penanganan sampah khususnya upaya mengurangi sampah dan limbah di Sulawesi Selatan masih terbatas.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sector pembangunan.
2. Belum optimalnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
3. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih redahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik

- b) Masih belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Angka kelahiran total masih relatif tinggi
- b) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- c) Tingginya *unmetneed* ber KB ;
- d) Tingginya peserta KB yang putus pakai (*drop out*)
- e) Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

9. Perhubungan

- a) Belum optimalnya pengembangan koridor dan peningkatan jumlah armada bus angkutan umum massal berbasis jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT) untuk membantu mengatasi kemacetan jalan dan peningkatan mobilitas antar wilayah;
- b) Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai jumlah dan standar, khususnya pada ruas jalan kewenangan provinsi
- c) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada Pelabuhan pengumpulan regional di Sulawesi Selatan.

10. Komunikasi dan Informatika

- a) Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi public
- b) Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai
- c) Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.

11. Koperasi dan UKM

- a) Tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat koperasi relatif terbatas. Hal ini menjadikan koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana perekonomian.
- b) Menurunnya jumlah koperasi aktif, akibat terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi;
- c) Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.

12. Penanaman Modal

- a) Terhambatnya investasi yang disebabkan antara lain permasalahan pada perolehan lahan dan ketersediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan
- b) Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja,

teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a) Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar;
- b) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang ditetapkan;
- c) Kurang optimalnya peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

14. Statistik

- a) Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
- b) Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
- c) Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assesment

16. Kebudayaan

Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

17. Perpustakaan

- a) Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
- b) Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
- c) Belum optimalnya sarpras dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat.

18. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
 - a. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan *e-arsip* terintegrasi.

Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a) Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam.
- b) Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
- c) Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan.

2. Pariwisata

- a) Belum optimalnya pengembangan pasar wisatawan ke Sulawesi

Selatan.

- b) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta pemasaran destinasi pariwisata.
- c) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing di bidang pariwisata.
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi pariwisata tentang sadar wisata dan kewirausahaan.
- e) Kurangnya inovasi dan kreasi produk wisata dan produk UKM sektor pariwisata.
- f) Pembiayaan untuk pengembangan Usaha Pariwisata di Sulawesi Selatan masih tinggi;

3. Pertanian

- a. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian;
- b) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pada beberapa wilayah, khususnya pada Kabupaten pendukung ketahanan pangan Sulawesi Selatan akan mempengaruhi peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional;
- c) Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d) Belum tercapainya mutu hasil pertanian dan perkebunan yang diharapkan, dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan;
- e) Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
- f) Masih dibutuhkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan serta peningkatan upaya pendampingan kelompok peternak.
- g) Menurunnya ketersediaan beras di Sulawesi Selatan
- h) Menurunnya ketersediaan energi dan protein perkapita di Sulawesi Selatan
- i) Terjadi rentan Terhadap Kerawanan Pangan di Sulawesi Selatan

4. Kehutanan

- a) Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b) Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c) Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
- d) Belum Optimalnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- e) Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
- f) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah

- g) Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompentensi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan
- h) Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis kawasan hutan.
- i) Perubahan/ alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan.
- j) Tingginya dinamika konflik penguasaan lahan di daerah akibat belum tersosialisasikannya secara baik rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan hingga pada tahap penetapan kawasan hutan dan kawasan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
- k) Belum optimalnya pelaksanaan operasi/patrol rutin penertiban dan pengamanan hutan serta penanganan tindak pelanggaran dibidang kehutanan;
- l) Masih rendahnya dukungan dan peran serta masyarakat dan para pihak terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan.
- m) Jejaring pemasaran produk hasil usaha kelompok tani masih bersifat local

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Masih maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (good mining practice);
- b) Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik.
- c) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relative rendah
- d) Masih bergantung pada penyediaan energi fosil
- e) Masih ada daerah di pulau terpencil, terisolir dan terdepan yang belum teraliri listrik
- f) Jumlah Produksi Komoditas Tambang Menurun
- g) Masih banyak daerah dan pulau yang belum mendapatkan air bersih di Sulawesi Selatan
- h) Penurunan Kuantitas Air Tanah di Sulawe Selatan
- i) Masih Banyak Pemanfaatan Air Tanpa Izin
- j) Masih banyaknya penambangan tanpa izin
- k) Sumber Daya Manusia yang belum memadai
- l) Sarana dan prasarana yang belum memadai

6. Perdagangan

- a) Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail modern karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b) Belum optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk

dan Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor.

- c) Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen dan penerapan SNI.

7. Industri

- a) Tingkat produktivitas pendapatan masih rendah
- b) Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani.
- c) Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal.
- d) Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas.
- e) Belum optimalnya terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani.
- f) Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbangan jarak dengan pasar.
- g) Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
- h) Belum meratanya persebaran industri di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan
- i) Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;

Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a) Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
- b) Ketersediaan data terkini yang belum akurat
- c) Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
- d) Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
- e) Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

- a) Belum optimalnya koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru dari sektor PAP.;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

- a) Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan

formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;

- b) Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian dan Pengembangan

- a) Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b) Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

5. Pengawasan

- a) Masih rendahnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b) Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
- c) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD
- e) Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.
- f) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan OPD belum memadai sehingga belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi kegiatan-kegiatan berdasarkan analisis resiko.
- g) Belum Optimalnya Keterlibatan Masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat di butuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga masih di perlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- h) Penyelesaian Rekomendasi Tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun internal hasil audit masih belum cukup memadai. Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan.
- i) Kualitas penyelenggaraan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih menunjukkan kabupaten/kota hasil agregasi yang cukup memuaskan. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap unit kerja.
- j) Pengelolaan asset pemerintah provinsi oleh OPD khususnya dalam pengelolaan administrasi kepemilikan serta inventarisasi aset masih belum tertib.
- k) Tingkat Kapabilitas Berdasarkan Penilaian Mandiri (self assessment) Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi

Selatan diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori "Infrastructure" atau di "Level 2" dari lima tingkatan (level).

b. Visi Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter".

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023, dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter". Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi	Pokok2 Visi	Penielasan Visi
Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "bersih dan melayani"
	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "sehat dan cerdas"
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "mandiri dan sejahtera".

Visi	Pokok2 Visi	Penielasan Visi
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "inklusif dan terkoneksi".
	Berkarakter	Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "berkarakter".

2. Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Sulawesi Selatan disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Sulawesi Selatan yang **Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang Bersih dan Melayani; Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas; Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera; Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter meliputi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan *Aksesibel*;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Sulawesi selatan 2018 - 2023 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD
Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023

No.	Pokok2 Visi	Misi
1.	Inovatif	(1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2.	Kompetitif	(4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

No.	Pokok2 Visi	Misi
3.	Produktif	(3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
		(5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
4.	Inklusif	(2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
		(5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
5.	Berkarakter	(4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Penjelasan masing-masing misi sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 1.10
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir
3.	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah
4.	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah, meningkatkan moralitas dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan

No.	Misi	Penjelasan Misi
5.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Misi pembangunan Sulawesi Selatan sejalan dengan arahan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024
dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPJMD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019 - 2023 dalam bentuk pernyataan – pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah. Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2021-2023). Sasaran ini juga juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018- 2023 berdasarkan Misi, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi 1 adalah : **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
 - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penjabaran tujuan pada Misi 2 adalah : **Meningkatkan Pemerataan infrastruktur wilayah**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Penjabaran tujuan pada Misi 3 adalah : **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
 - b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat
4. Penjabaran tujuan pada Misi 4 adalah: **Meningkatkan**

kualitas SDM secara inklusif, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembangunan
 - d. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
5. Penjabaran tujuan pada Misi 5 terbagi atas 2 tujuan yaitu :
- a. **Meningkatkan produktivitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut yaitu Meningkatkan hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
 - b. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**, dengan rumusan sasaran : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Menengah

Prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi serta janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan A. Sudirman Sulaiman, ST. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Gubernur terdapat 5 Program Nyata yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu :

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi Komoditas Sulawesi Selatan.
- 2) Pembangunan Infrastruktur yang Menjangkau Masyarakat Desa Terpencil.
- 3) Rumah Sakit Regional di 6 Wilayah dan Ambulance Siaga.
- 4) Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani.
- 5) Destinasi Wisata Andalan Berkualitas Internasional.

Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 Tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain:

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- 2) Pencapaian SDGs.
- 3) Pengentasan kemiskinan.
- 4) Pencapaian NSPK dan SPM.
- 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- 6) Pengembangan daerah terisolir.

Selain kedua pertimbangan diatas, program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 2) Penguatan infrastruktur wilayah

- 3) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
- 4) Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
- 5) Pembangunan manusia
- 6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
- 7) Pelestarian lingkungan hidup

Proyek prioritas strategis daerah merupakan upaya menjawab isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek prioritas strategis daerah Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, KPBU, dan Swasta.

Proyek prioritas strategis daerah Sulawesi Selatan merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas nasional (*Major Project*) dengan prioritas pembangunan daerah yang disajikan berdasarkan sasaran misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Pelaksanaan proyek prioritas strategis daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dan RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar prioritas pembangunan daerah beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023

No.	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				Tahun Pelaksanaan
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA/ BUMN	
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					
1.	Pengembangan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		√			2021-2023
II	Berkembangnya Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
1.	Pengembangan Baruga Layanan Publik		√			2021-2023
2.	Pembangunan Mall Pelayanan Publik		√			2019-2023
3.	Pembangunan Twin Tower Pusat Perkantoran dan Jasa Pelayanan Publik		√		√	2021-2023
III	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah					
1.	Pembangunan jalan tol pesisir Selatan	√	√		√	2022-2023
2.	Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata	√	√	√		2022-2023
3.	Pembangunan jalan dan jembatan pada daerah terisolir	√	√			
4.	Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe B di Jeneponto, Bantaeng, Wajo, Parepare dan Palopo		√			2018-2023
5.	Pembangunan dan Rehabilitasi Pelabuhan Bira; Bajoe; dan P. Jampea	√	√			2021-2023
6.	Pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik di Kawasan Strategis dan Pulau Pulau Kecil	√	√		√	2022-2023
7.	Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga	√		√		2023
8.	Pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi Listrik	√	√		√	2021-2023
9.	Pembangunan jalur KA Lintas Makassar-Parepare	√		√		2021-2023
10.	Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dan berbasis jalan	√	√	√		2021-2023
11.	Pembangunan bandara Buntu Kunik	√	√			2021-2023
12.	Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin	√		√		2021-2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

No.	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				Tahun Pelaksanaan
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA/ BUMN	
13.	Pengembangan Bandara Seko dan Rampi	√				2021 - 2023
14.	Pengembangan pelabuhan Makassar	√		√	√	2021-2023
15.	Pembangunan SPAM Regional Mamminasata	√	√			2021-2023
16.	Pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil (ARSINUM) Berbasis Masyarakat	√	√			2020-2023
17.	Pembangunan Waduk Multi Guna dan Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Saddang dan DI Pammukkulu	√			√	2022-2023
IV	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah					
1.	Pengembangan pusat pembibitan dan budidaya komoditas ikan dan udang	√	√			2021-2023
2.	Peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan garam	√	√			2021-2023
3.	Pengembangan kawasan peternakan	√	√		√	2021-2023
4.	Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan destinasi pariwisata DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja berupa dermaga dan bandara	√	√			2022-2023
V	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Antar Lapisan Masyarakat					
1.	Penanganan kawasan kumuh dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa/Milik	√	√			2021-2023
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Rest Area melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UMKM) dan BUMDES	√	√		√	2020-2023
3.	Pengembangan PTSP Prima berbasis elektronik	√	√			2020-2023
VI	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan					
1.	Pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian	√				2021-2023
2.	Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah		√			2021-2023
3.	Pembangunan Stadion Mattoangin	√	√	√		2022-2023
4.	Pembangunan Islamic Centre		√			2020-2023
VII	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
1.	Pembangunan RS Regional		√			2020-2023
2.	Penanganan stunting	√	√			2019-2023

No.	Sasaran Pembangunan Dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				Tahun Pelaksanaan
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA/ BUMN	
VIII	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan					
1.	Pengembangan kewirausahaan perempuan perdesaan	√	√			2019-2023
IX	Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah					
1.	Pembangunan RPH Modern		√			2022-2023
2.	Pembangunan TPI		√			2021-2023
3.	Pembangunan PPI	√	√			2021-2023
4.	Pembangunan industri pupuk		√			2023
5.	Pembangunan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian dan perkebunan	√	√			2022-2023
6.	Pembangunan pasar ikan dan sentra kuliner di Pinrang dan Bone	√				2022-2023
7.	Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri di Barru, Pinrang, Luwu Timur dan Bone	√				2022-2023
8.	Revitalisasi Tambak	√	√	√		2022-2023
9.	Pembangunan KI Takalar	√		√	√	2022-2023
X	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim					
1.	Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3	√		√		2021-2023
2.	Pembangunan sistem pengolahan limbah setempat dan terpusat skala kota dan skala permukiman (SPALD-T; SPALD-S; IPLT)	√	√	√	√	2021-2023
3.	Pembangunan Sistem Pengolahan Persampahan Skala Kota (TPA); skala kawasan (TPST) dan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	√	√	√		2021-2023

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, diolah 2020

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan dipetakan dalam dua kategori yaitu Matriks Program Pembangunan Daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2016 (sebelum Perubahan RPJMD) dan Matriks Program Pembangunan Daerah (setelah RPJMD Perubahan) berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur Program sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021-2023

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD		
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter															
Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif															
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/Angka	B	BB (71 - 80)		BB (71 - 80)		A (81 - 90)		A (81 - 90)				
	Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/Angka	B	BB (>70-80)		A (>80 - 90)		A (>80 - 90)		A(>80 - 90)				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	Persentasi	100 %	100 %	5,435,028,632.0	100 %	5,553,028,632.00	100 %	6,330,130,000.00	100 %	17,318,187,264.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;	Persentasi	57 %	60 %	5,980,746,888	63%	6,025,602,490.0	65 %	6,415,458,971.0	65 %	18,421,808,349.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;	Persentasi	80%	85 %		90 %		100 %		100 %		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Persentasi	88 %	91 %		93 %		95 %		95%		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi	Persentasi	100 %	100 %	4,794,694,160	100 %	6,355,369,118.0	100 %	9,280,135,220.0	100 %	20,430,198,498.00	BIRO ORGANISASI		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	Persentasi	65,96 %	70.20%	12,256,108,048.0	75.40%	12,592,465,578.96	79.50%	16,040,112,029.04	79.50%	40,888,685,656.0	INSPEKTORAT DAERAH		
		Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Persentasi	68,83%	69.59%		71.04%		72.50%		72.50%				
		Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	Persentasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	1	
5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	Persentasi	100 %	100 %	14,241,588,156.0	100 %	14,591,598,156.	100 %	15,713,198,815.0	100 %	44,546,385,127.0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
		Persentase peningkatan capaian kinerja program	indeks	N/A	0,5%		0,5%		0,5%		0,5%				
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Nilai	2,66	2,80	3,799,568,236	2,90	4,000,000,000.0	3,00	4,500,000,000.0	3,00	12,299,568,236.0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
7	PROGRAM FASILITASI DAN	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan	Persentasi	2,4	3	20,289,253,332	4	20,289,253,332	5	21,289,253,332	5	61,867,759,996.0	BIRO HUKUM		
		Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	Persentasi	100%	100%		100%		100%		100%		BIRO HUKUM		
8	PROGRAM ADMINISTRASI	Persentase BUM Desa Yang difasilitasi	Persentasi	11.81%	11.81 %		11.81 %		11.81 %		11.81 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		Persentase Desa yang difasilitasi	Persentasi	5.01 %	15.03 %		20,04 %		25,05 %		25,05 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	B	B (3,51 - 4)		A- (4,01 - 4,50)		A (4,51 - 5,0)		A (4,51 - 5,0)				
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	Persentasi	N/A	3 %	11,269,424,704	3 %	6,405,000,000.0	3 %	6,992,500,000.0	9 %	24,666,924,704.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi public	Persentasi	60%	80 %		90 %		100 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI DAN		
		Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara	Persentasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai	Persentasi	80%	80%	1,324,672,696	85%	1,491,000,000	90%	1,500,000,000	90%	4,315,672,696.0	DINAS PENANAMAN MODAL		
	Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel														
	Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	Indeks	0.639	0.601		0.6		0.6		0.6				
	Sasaran 3: Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	76.06	79.5		81.7		83.4		83.4				

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Km	61.52%	72.30%	239,144,922,402.0	74.24%	229,315,396,350.54	75.09%	239,211,231,213.06	75.09%	707,671,549,965.60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
		Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda	Persentase	20.48%	42.72%		71.79%		74.25%		74.25%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
13	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang	980.537 Orang	1.028.000 Orang		1.074.000 Orang		1.105.000 Orang		1.105.000 Orang		DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah pelabuhan strategis provinsi	Persentase	10	11 Lokasi		11 Lokasi		11 Lokasi		11 Lokasi		DINAS PERHUBUNGAN		
		Persentase pelabuhan yang beroperasi	Persentase	35 %	35 %		35 %		35 %		35 %		DINAS PERHUBUNGAN		
14	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase	96,82 %	98,25 %	15,240,188,500.00	98.50%	15,466,113,573.00	99 %	16,277,888,192	99 %	46,984,190,265.0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
		Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	Persentase	98.09	99%		99,25 %		99,50 %		99,50 %		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Provinsi	Persentase	72,71 %	77,00 %	101,989,809,567	78,5 %	94,348,629,180.0	80 %	97,815,160,625.25	80%	294,153,599,372.25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
		Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan Pantai	Persentase	100%	100%		100%		100%		100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arsinum di kawasan Pesisir dan Kepulauan	Persentase	100 %	100 %	3,521,804,832.00	100 %	2,924,590,828.0	100 %	9,765,813,300.0	100 %	16,212,208,960.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
		Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman	Persentase	89,77 %	91 %		92 %		93 %		93 %		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
		Persentase panjang jalan											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas	Persentase	0	100%	160.619.100	100%	25.014.213.852.66	100 %	25.933.279.234.48	100 %	51.108.112.187.14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD		
					2021		2022		2023						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	1	
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota	Persentase	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif														
	Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rp.	56,98	59,23		62,37		65,98		65,98				
		Angka Kemiskinan	%	8.69	8.7		8.1		7.45		7.45				
	Sasaran 4: Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.62	7.20		6.95		6.27		6.27				
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Persentase	0,5 %	0,5 %		0,7 %		1,0 %		1,0 %			DINAS KEBUDAYAAN DAN	
		Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	Persentase	12,5 %	12,5 %		12,5%		20,8 %		20,8 %				
19	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan wisata	Peningkatan Kunjungan wisata	116 %	100%		100%		100%		100%				
		Kunjungan wisata	Peningkatan Kunjungan wisata	58,27 %	100%		100%		100%		100%				
20	PROGRAM PENATAAN	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan		5 Kawasan	11 Kawasan	75.269.455.924	13 Kawasan	100.252.227.501.0	15 Kawasan	100.404.195.675.0	15 Kawasan	204.026.879.100.0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
21	PROGRAM PENEMPATAN	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan	Persentase	3.48 %	3.91 %	692,176,310.0	4.13 %	945,000,000.0	4.35 %	995,000,000.0	4.35 %	2,632,176,310.0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	Persentase	58.17 %	58.78 %		59.09 %		59.41 %		59.41 %			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan	Persentase	71.4 %	72,92 %	2,623,431,000.00	75.00%	2,715,599,600.00	77,08 %	3,145,599,600.00	77,08 %	8,484,630,200.00		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
22		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha	Persentase	70 %	75.00%		80.00%		85.00%		85 %			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA (Rp. Triliun)	Rp	4,54	3,50	1.147.031.000	4	1.640.000.000.0	4,5		16,54	1.007.031.000.0		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
		Jumlah Realisasi PMDN (Rp. Triliun)	Rp	5,67	4,50		5		5,67		20,84			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Persentase	0.16%	0.19%		0.22%		0.25%		0,25 %			DINAS KEMUDAAN DAN	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	1	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	Persentase	1.09%	1.16%		1, 19 %		2.03%		2,03				
	Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Nilai	0.39	0.38		0.38		0.38		0.38				
	PROGRAM KAWASAN	Persentase Luas Kawasan											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang	Persentase	5%	7%	5.191.925.000	9%	4.947.882.840.51	11%	7.129.676.594.20	11%	17.269.484.434.71	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
27	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam	Persentase	5%	15%	2,540,860,490	20%	5,497,330,677.35	25%	7,699,312,092.70	25%	15,737,503,260.05	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	Persentase	0,15%	1%		2%		3%		3%		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah													
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi	Persentase	100 %	100%	47,735,000	100%	47,315,000.00	100%	150,000,000.00	100%	245,050,000.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	Persentase	0.5 %	3,5%	10,019,193,024	3,6%	10,021,112,326.40	3,7%	11,023,223,559.04	3,7%	31,063,528,909.44	DINAS SOSIAL		
		Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	Ton	100%	100%		100%		100%		100%		DINAS SOSIAL		
31	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Talas Satoimo (Ton),	Ha	5.432,55 Ton	7000 Ton		7000 Ton		7000 Ton		26432,55 ton				
		Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Salayar (Ha)	Kw/Ha	N/A	100 Ha		110 Ha (210 Ha)		121 Ha (331 Ha)		331 ha				
		Produktifitas Padi	Kw/Ha	51 Kw/Ha	48,95 Kw/Ha		49,68 Kw/Ha		50,43 Kw/Ha		50,43 Kw/Ha				
		Produktifitas Jagung	Kw/Ha	57 Kw/Ha	54,10 Kw/Ha		54,91 Kw/Ha		55,73 Kw/Ha		55,73 Kw/Ha				
		Produktifitas Kopi	Kw/Ha	588 Kg/Ha	588 Kg/Ha		588 Kg/Ha		588,1 Kg/Ha		588,1 Kg/Ha				
		Produktifitas Kakao	Unit	634 Kg/Ha	9,000.00		10.500 Kg/Ha		12.000 Kg/Ha		39.000 Kg/Ha				
		Peningkatan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Ton	377 Unit	250 Unit		275 Unit		300 Unit		1.655 Unit				

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	1	
		Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	266,50 Ton	298,65 ton		310,60 ton		323,02 ton		1.495,55 ton				
		Produksi Daging (ton)	Ton	150.462 ton	167,936	25,255,257,217.00	177,425	24,502,687,679.00	187,450	24,597,911,781	187,450	74,355,856,677.0	DINAS PETERNAKAN		
		Produksi Telur (Ton)	Ton	250.289 ton	191,968		202,814		214,274		214,274				
		Produksi Susu (Ton)	Persentase	1.888 Ton	2,035		2,096		2,159		2,159				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Kelembagaan											DINAS PEMBERDAYAAN		
		Persentase Posyandu aktif;	Persentase	99,89 %	99,89 %		99,91 %		99,98 %		99,98 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		Persentase PKK aktif	Persentase	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan		20%	30%	2,399,575,000	40%	2,399,575,000	50%	4,399,575,000	50%	9,198,725,000.0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter														
	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71.66	72.20		72.57		73.05		73.05				
	Sasaran 6: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	64.64	66.29		66.57		67.05		67.05				
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN spm prioritas	Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	Persentasi	50,05 %	60,25 %	1,040,979,665,047.0	61,15 %	996,300,000,000.0	62,00 %	1,003,200,000,000.0	62,00 %	3,040,479,665,047.0	DINAS PENDIDIKAN		
		Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	Persentasi	90 %	91,45 %		92,90%		93,90%		93,90%		DINAS PENDIDIKAN		
		Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam													
		Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun													
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM prioritas	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu	Persentasi	50,05%	54,25%	894,323,500.0	55,60%	3,485,169,147.82	57,25%	3,855,419,147.82	57,25%	8,234,911,795.64	DINAS PENDIDIKAN		
		Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan													

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					2021		2022		2023						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai	77.58	77.76		77.82		77.86		77.86				
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAINC KEOLAHRAJARAN	PersentasePeningkatan Prestasi olah raga	Medali	291,36 %	100%		0		200%		200%		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentasi	80%	90%		95%		100%		100%				
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	Rasio	17/100.000 Pddk	23/100.000 Penduduk		23/100.000 Penduduk		23/100.000 Penduduk		23/100.000 Penduduk		DINAS KESEHATAN		
		Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	Persentasi	80%	95%		97%		100%		100%		UPT TRANSFUSI DARAH		
		Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	Persentasi	30 %	40%		45 %		50%		50%		UPT PELATIHAN KESEHATAN		
		Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	Persentasi	100 %			100 %		100 %		100 %		UPT PELATIHAN KESEHATAN		
		Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut											UPT RSK GIGI DAN MULUT		
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentasi	40 %	60%		65 %		70 %		70%		RSUD LABUANG BAJI		
		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang	Persentasi	80 %	0		90 %		100 %		100 %		RSUD HAJI MAKASSAR		
		Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	Persentasi	42,9 %	55,9 %		77,4 %		100 %		100 %		RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH		
		Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	Persentasi	65 %	70 %		85%		100%		100%		RSK IBU DAN ANAK PERTIWI		
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentasi	33 %	33 %		12 %		24 %		24%		RSUD SAYANG RAKYAT		
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Rasio tenaga kesehatan	Persentasi	17/100.000 Pddk	23/100.000		23/100.000		23/100.000		23/100.000		DINAS KESEHATAN		
		Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada	Persentasi	80%	95%		97%		100%		100%		UPT TRANSFUSI DARAH		
		Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	Persentasi	30 %	40%		45 %		50%		50%		UPT PELATIHAN KESEHATAN		
		Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	Persentasi	100 %			100 %		100 %		100 %		UPT PELATIHAN KESEHATAN		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	1	
		Persentase tenaga													
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentasi	40 %	60%	2,062,103,200.0	65 %	375,000,000.0	70 %	585,000,000.00	70%	3,022,103,200.0		UPT RSK GIGI DAN MULUT RSUD LABUANG BAJI	
		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang	Persentasi	80 %	0		90 %	4,200,000,000.0	100 %	5,250,000,000.0	100 %	9,450,000,000.0		RSUD HAJI MAKASSAR	
		Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	Persentasi	42,9 %	55,9 %	156,594,000.0	77,4 %	400,000,000.0	100 %	400,000,000.0	100 %	956,594,000.0		RSK IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	
		Meningkatnya Kompetensi teknis SDM	Persentasi	65 %	70 %	89,700,000	85%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	689,700,000.0		RSK IBU DAN ANAK PERTIWI	
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentasi	33 %	33 %	144,000,000.0	12 %	150,000,000.0	24 %	360,000,000.0	24%	654,000,000.0		RSUD SAYANG RAKYAT	
	Sasaran 8: Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	76.01	75.21		76.36		77.23		77.23				
40	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Persentase	0%	10%	1,111,761,124.0	25%	910,501,000.00	35%	1,065,501,000.00	35%	3,087,763,124.0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN	
														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN	
														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN	
	Sasaran 9: Meningkatkan aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan	Angka kriminalitas	Kasus	25.121 (2018)	24.709		24.573		24.438		24.438				
42	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan												SATHAN POLISI PAMONG PRAJA	
43	PROGRAM KESEJAHTERAAN	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang	Persentasi	100 %	100 %	1,225,538,715,412	100 %	1,226,220,302,319.0	100	1,228,220,266,319.0	100	3,679,979,284,050.0		BIRO KESEJAHTERAAN	
		Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama	Persentasi	96.67	95.25		95.50		95.55		95.55			BIRO KESEJAHTERAAN	
		Persentase Penurunan kasus Kejahatan terhadap Perempuan (Peristis)	Persentasi	10 %	10 %		10 %		10 %		10 %			BIRO KESEJAHTERAAN	
44	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	Persentasi	N/A	20 %	274,996,630	20 %	181,445,057.20	20 %	200,115,753.59	60 %	656,557,440.79		BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka									
					2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	1
45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	Persentasi	937	0		20 %		40 %		40 %			
		Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	Persentasi	100 %	100%		100%		100%		100%			
	Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam													
	Tujuan 5: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.92	4,10 - 5,55		4,62 - 5,98		5,04 - 6,52		5,04 - 6,52			
	Sasaran 10: Meningkatkan hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp / Angkatan Kerja	82.027.871	76913142.88		77086000.1		77349122.29		77349122.29			
46	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Serangan OPT (%)	Persentasi	5.00%	4,7 %		4,6 %		4,5 %		4,5 %		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
		Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat (%)	Persentasi	70.00%	76,49 %	10,227,232,050.00	78,79 %	7,002,338,017.50	81,15 %	7,352,454,918.88	81,15 %	24,582,024,986.38		
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Rp. 8.631,30 M	Rp. 8.852,48 M		Rp. 9.029,52 M		Rp. 9.210,12 M		Rp. 9.210,12 M			
		Produksi perikanan tangkap	Ton	398.565,2 Ton	396.992,3 Ton		404.932,2 Ton		413.030,8 Ton		413.030,8 Ton			
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentasi	30,18 %	23,89 %		27,07 %		30,25 %		30,25 %			
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang	Persentasi	31,58 %	57,89%		68,42%		78,95%		78,95%			
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentasi	24,26%	25,61%		26,79%		27,17%		27,17 %			
48	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp	Rp. 14.856,34 M	Rp. 14.474,73 M		15.198,47 M		Rp. 15.958,39 M		Rp. 15.958,39 M		DINAS KELAUTAN DAN	
		Produksi perikanan budidaya	Ton	3.662.761,4 ton	3.898.767,4 Ton		4.093.705,8 Ton		4.298.391,1 Ton		4.298.391,1 Ton			
		Persentase ketersediaan benur berkualitas	Persentasi	90%	100%		100%		100%		100 %			
49	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	4.042 Ton	283 Ton		283 Ton		283 Ton		2.10596 Ton			
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	M3	132.100 M3	92.336,62 M3		92.336,62 M3		92.336,62 M3		477175.12 M3			

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPIMD		
					2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Persentase Kerusakan Hutan pertahun	Persentasi	17,43 %	17,59 %		16,20 %		14,82 %		14,82 %				
		Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	Persentasi	55,73 %	57,91 %		61,60 %		65,47 %		65,47 %				
50	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan (Rp.)	Rp	51.006.977.860 Rp	460.835.232.750 Rp	193.308.259.883.19	463.034.340.435 Rp	211.404.665.383.70	465.893.180.426 Rp	213.943.902.220.83	465.893.180.426 Rp	618.656.827.487.72		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
		Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan (Rp.)	Rp	3.980.600.000 Rp	6.000.000.000 Rp		7.000.000.000 Rp		8.000.000.000 Rp		8.000.000.000 Rp				
		Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan	Rp	9.412.084.000 (Rp)	29.493.840.000 (Rp)	33.954.745.936	37.059.609.113 (Rp)	34.676.405.559.0	38.617.836.192 Rp	34.691.405.559.0	38.617.836.192 Rp	103.322.557.054.0		DINAS PETERNAKAN	
51	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Hilirisasi Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp	Rp. 293,120 Milyar	Rp. 304,96 Milyar		Rp. 311,06 Milyar		Rp. 317,28 Milyar		Rp. 317,28 Milyar				
		Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	5.332,1 Ton	5.329,0 Ton		5.436,2 Ton		5.544,1 Ton		5.544,1 Ton				
		Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	Persentasi	20%	60%		80%		100%		100%				
52	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	Persentasi	6%	5%	12,191,374,570	6%	11,891,365,249.92	7%	13,595,969,372.85	7%	37,678,709,192.77		DINAS PERINDUSTRIAN	
53	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	\$	57.950.717 \$ US	146.674.567 \$	279,005,000	158.408.532 \$ US	678,875,000	171.081.215 \$ US	1,023,875,000.00	476.164.314 \$ US	1,981,755,000.0		DINAS PERDAGANGAN	
	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	64.76	72.25		72.63		72.84		72.84				
	Sasaran 10: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan	Potensi Penurunan emisi CO2eq	Ton	0.86	1.07		1.198		1.347		1.347				
54	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persentase	100 %	100%	174,810,600	100%	260,000,000.00	100%	340,000,000.00	100%	774,810,600.0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sub/level yang	Persentase	20 %	30%	46,531,119,000.0	50%	46,751,820,455	100%	52,841,102,517	100%	146,124,041,972.49		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	Persentase	42 %	50%		75%		100%		100%			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	Persentase	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan	Persentase	0.7	0.8	1,955,622,800	0.8	5,001,420,000.0	1	5,001,400,000.0	1	11,958,442,800.0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka								Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14	1	
56	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	Jumlah DAS yang direhabilitasi	Jumlah Das	2 DAS	2 DAS	2,425,940,000	2 DAS	2,725,940,000	2 DAS	2,725,940,000	2 DAS	7,877,820,000.0	DINAS KEHUTANAN		
57	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	Persentase	3,40%	3,95%	2,195,449,654	4,59%	2,410,295,500	5,40%	2,610,295,500	5,40%	7,216,040,654.0	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Cakupan limbah yang											DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
59	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	Persentase	88,47	92 %	622,886,000.00	93.4 %	632,119,742	95 %	665,306,352	95 %	1,920,312,094.0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
60	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	Ton	140.338,9 ton	46.500 Ton		47.500 ton		48.450 ton		48.450 ton				
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi	Persentase	4,35%	50,17 %		74,08 %		100%		100%				
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara	Persentase	67,28%	67,29%		67,30%		67,31%		67,31%				
61	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan		99,40%	97,40%	11.139.152.608	99,70%	11.584.848.371.39	99,95%	11.641.422.613.0	99,95%	34.365.423.592.39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
62	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase	26 %	29,20 %		30,80 %		32,40 %		32,40 %			DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase Layanan Angkutan Darat;	Persentase	51 %	54 %		56 %		58 %		58 %			DINAS PERHUBUNGAN	
		Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Persentase	123.750 orang	365.000 orang		485.000 Orang		605.000 Orang		605.000 Orang			DINAS PERHUBUNGAN	
		Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	Persentase	15 %	22 %		22 %		30 %		30 %			DINAS PERHUBUNGAN	
		Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi		12 Ruas	20 Ruas		20 Ruas		20 Ruas		20 Ruas			DINAS PERHUBUNGAN	
		Jumlah Terminal Bis terkelola		3	10		13		16		16			DINAS PERHUBUNGAN	
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Persentase	48,51 %	72%	673,265,512	73%	2,100,450,000	74%	800,450,000	74%	3,574,165,512.0	DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasar Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.14

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Target P-RKPD Tahun 2023	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKP Tahun 2023	Keterangan
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/angka	B (61,18)	B (66,16)	A (81 - 90)	A (81 - 90)	A (81 - 90)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/angka	B (65,01)	B (68,08)	A (>80-90)	A (>80-90)	A(>80-90)		
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/angka	A (4,10)	A- (4,34)	A (4,51 - 5,0)	A (4,51 - 5,0)	A (4,51 - 5,0)		
	Penguatan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,568	0,567	0,607	0,565	0,607		Target RPJMD telah tercapai

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Target P-RKPD Tahun 2023	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKP Tahun 2023	Keterangan
2	infrastruktur wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	79,44	81,33	83,4	83,4	83,4		
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	59,66	65,59	65,98	65,98	65,98		
			7	Tingkat Kemiskinan	%	8,53	8,66	7,45	7,45	7,45	7,75-8,00	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,72	4,51	5,69	4,46	5,69	4,95-5,50	Target RPJMD telah tercapai
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio Gini	Angka	0,377	0,365	0,381	0,362	0,380		Target RPJMD telah tercapai
	Akselerasi	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM	Angka	72,24	72,82	73,05	73,49	73,05		Target RPJMD telah tercapai

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Target P-RKPD Tahun 2023	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKP Tahun 2023	Keterangan
5	pembangunan Sumber daya manusia											
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan	Angka	65,76	66,35	67,05	67,42	67,05		Target RPJMD telah tercapai
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	12	Indeks Kesehatan	Angka	77,94	78,41	77,86	78,48	77,23		Target RPJMD telah tercapai
		Masyarakat Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan										
			13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76,32	76,37	77,86	77,86	77,86		
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka kriminalitas	Kasus	15.210	26.684	24.438	24438	24,438		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023	Target P-RKPD Tahun 2023	Target P-RPJMD Tahun 2023	Target RKP Tahun 2023	Keterangan
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	5,09	5,04-6,52	5,04-6,52	5,04-6,52	6,7-7,3	
7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas Total Daerah	Rp/Angkatan Kerja	77.819.958	79.149.921.	77.349.122	81.628.228	77.349.122		Target RPJMD telah tercapai
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17	IKLH	poin	73,23	74,17	72,84	74,91	72,84		Target RPJMD telah tercapai
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq	1,13	1,36	1,347	1,428	1,347		

e. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.15

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	A (>81-90)
2	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	A (4,51-5,0)
3	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	83,40
4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,69
5	Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini (Nilai)	0,381
6	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Indeks Pendidikan	67,05
7	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,86
8	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,23
9	Meningkatnya aktualitas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan Masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	24.438
10	Meningkatnya hirilisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah (%)	77.349.122
11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1,347

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (81-90)
	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	2. Nilai SAKIP	A (>81-90)
	2 Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3. Indeks Pelayanan Publik	A (4,51-5,0)
2	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4. Indeks Williamson	0,607
	3 Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5. Indeks Layanan Infrastruktur	83,40
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	6. PDRB Perkapita AHB (Juta Rp)	65,98
		7. Tingkat Kemiskinan (%)	7,45
	4 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,69
	5 Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	9. Rasio Gini (Nilai)	0,381
4	Meningkatkan Kualitas SDM yang kompetitif, inklusif dan berkarakter	10. IPM (Nilai)	73,05
	6 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	11. Indeks Pendidikan	67,05
	7 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12. Indeks Kesehatan	77,86
	8 Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam Pembangunan	13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,23
	9 Meningkatnya aktualitas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan Masyarakat	14. Angka Kriminalitas (kasus)	24.438
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	15. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04 - 6,52
	10. Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16. Produktifitas Total Daerah (%)	77.349.122
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,84
	1 Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18. Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1,347

1.1.3 Standar Pelayanan Minimal

a. Pertimbangan Penerapan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan pada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan harus mampu dicapai oleh setiap daerah sesuai dengan batas waktu capaian yang ditentukan.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai

dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Makassar menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

b. Dasar Penerapan SPM

Dasar hukum penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541.);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 141/II/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

c. Kebijakan Daerah Dalam Penerapan SPM

Adapun Kebijakan Umum daerah dalam rangka Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM telah dituangkan dalam RPJMD yang digambarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum di bidang Pendidikan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan Pendidikan berkualitas serta kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi.
2. Kebijakan umum di bidang Kesehatan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berkualitas beserta sarana penunjang kesehatan.
3. Kebijakan Umum di bidang Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu peningkatan penataan infrastruktur perkotaan yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup;

4. Kebijakan Umum dibidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya lokal masyarakat, pembinaan mental spritual masyarakat serta penyebarluasan informasi produk-produk hukum kepada masyarakat.
5. Kebijakan umum dibidang Sosial yaitu pemberian bantuan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel .berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,82	74,60	2,44
2	Angka Kemiskinan	8,66	8,70	0,46
3	Angka Pengangguran	4,51	4,33	- 3,99
4	Pertumbuhan Ekonomi	360,87	377,16	4,51
5	Pendapatan Perkapita	65,59	65,59	0
6	Gini Ratio	0,377	0,377	0

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci (Keluaran)

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
INDEKS CAPIAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	90,51	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	84,93	Dinas Pendidikan	-
Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,75	Dinas Kesehatan	-
	1.b.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	86,4	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	Dinas Kesehatan	-
	1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	100	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,17	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	-	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	-	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	-
	1.c.5	Rasio kemantapan jalan	75,37	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	38,57	Dinas Bina Marga	-
	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Perumahan					
	1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
	1.d.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10; 15 Ha yang ditangani	27,008	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
	1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	48,13	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	93,33	Satuan Polisi Pamong Praja	-
	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	-
	1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100	BPBD	-
	1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	BPBD	-
	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Sosial	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	Dinas Sosial	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
	2.a.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	75	Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,036	Disnakertrans	-
	2.a.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	8.398.161.382	Disnakertrans	-
	2.a.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	93,35	Disnakertrans	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	80,809	Disnakertrans	-
	2.a.5	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	68,94	Disnakertrans	-
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	32,92	Dinas P3A,Daldukk &KB	-
	2.b.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,4	Dinas P3A,Daldukk &KB	-
	2.b.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	27,39	Dinas P3A,Daldukk &KB	-
Pangan	2.c.1	Persentase cadangan pangan	255,16	Dinas Ketahanan Pangan	-
Pertanahan	2.d.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
	2.d.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	44,74	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.d.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	-	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
Lingkungan Hidup	2.e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	74,3	Dishut & LH	-
	2.e.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70,1	Dishut & LH	-
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1.1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Disdukcapil	-
	2.f.1.2	Pemanfaatan data kependudukan	55,55	Disdukcapil	-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	25,12	Dinas PMD	-
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	32,78	Dinas PMD	-
Pengendalian Penduduk dan KB	2.h.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,13	Dinas P3A, Dalduk & KB	-
	2.h.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,84	Dinas P3A, Dalduk & KB	-
				Dinas P3A, Dalduk & KB	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,07		-
Perhubungan	2.i.1	Rasio konektivitas Provinsi	0,69	Dinas Perhubungan	-
	2.i.2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,47	Dinas Perhubungan	-
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	-
	2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	27,93	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	-
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	68,96	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	-
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.k.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,9	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	74,18	Dinas Koperasi & UKM	-
Penanaman Modal	2.l	Persentase peningkatan investasi di provinsi	15,38	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,4	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,35	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-
	2.m.3	Peningkatan prestasi olahraga	322	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-
Statistik	2.n.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo, Statisti & Persandian	-
	2.n.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Diskominfo, Statisti & Persandian	-
Persandian	2.o	Tingkat keamanan informasi pemerintah	46,66	Diskominfo, Statisti & Persandian	-
Kebudayaan	2.p	Terlestarikannya Cagar Budaya			-
Perpustakaan	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86,74	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
	2.r.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	45,1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kearsipan					
	2.r.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,66	Dinas Perpustakaan dan Arsip	-
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	98,06	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	56,35	Dinas Perikanan & Kelautan	-
Pariwisata	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	31,13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	6,48	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-
	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	384,13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,33	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	536,24	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-95,17	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
Kehutanan	3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	30,67	Dishut & LH	-
	3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,051	Dishut & LH	-
	3.d.3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	73,25	Dishut & LH	-
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.e.2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
Perdagangan	3.f.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-8,59	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	58,33	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	27,4	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.f.4	Tertib Usaha	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	78,008	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	81,02	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.f.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	28	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	32	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Perindustrian	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan	-
Transmigrasi	3.h	-	-	-	-
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG					
Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11,043	BKAD	-
	4.a.2	Rasio PAD	54,69	Dinas Pendapatan Daerah	-
	4.a.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	57,16	BKAD	-
	4.a.4	Opini Laporan Keuangan	WTP	BKAD	-
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	4.a.6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Inspektorat	-
Pengadaan	4.i.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-
	4.i.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	22,58	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-
	4.i.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	23,95	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-
Kepegawaian	4.j.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78,31	BKD	-
	4.j.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29,15	BKD	-
	4.j.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKD	-
Manajemen Keuangan	4.k.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,53	BKAD	-
	4.k.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,15	BKAD	-
	4.k.3	Assets management	Tersedia	BKAD	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	4.k.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,01	BKAD	-
Transparansi dan Partisipasi Publik	4.l.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	91,58	BKAD	-
	4.l.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	BKAD	-

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (Hasil)

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	499	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.333	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	227.944	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	122.296	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	1.848	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1.361	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	15.814	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	10.381	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	2.649	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2.108	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	3.491	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2.222	Dinas Pendidikan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	8.333	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.864	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang emiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	358	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	212	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	63	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/ workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	48	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/ workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ Sederajat	2.642	Dinas Pendidikan	-
	1.a.1	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.564	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	80	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6.543	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jpendidikan khusus	605	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	1.218	Dinas Pendidikan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	661	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	279	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	551	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	43	Dinas Pendidikan	-
	1.a.2	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	209	Dinas Pendidikan	-
Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	48	Dinas Kesehatan	-
	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2.642	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.564	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	80	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	-	Dinas Kesehatan	-
	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	6.543	Dinas Kesehatan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.b.3	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	605	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.218	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	661	Dinas Kesehatan	-
	1.b.4	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	279	Dinas Kesehatan	-
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	NA	Dinas PSDA	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	NA	Dinas PSDA	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	NA	Dinas PSDA	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	NA	Dinas PSDA	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Tidak Ada	Dinas PSDA	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Tidak Ada	Dinas PSDA	-
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Tidak Ada	Dinas PSDA	-
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	67,01	Dinas PSDA	-
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	74,39	Dinas PSDA	-
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	60,39	Dinas PSDA	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.c.3	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada	Dinas PSDA	-
	1.c.3	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada	Dinas PSDA	-
	1.c.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	1 UPTD	Dinas PSDA	-
	1.c.3	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak	Dinas PSDA	-
	1.c.3	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	2 kerja sama	Dinas PSDA	-
	1.c.4	Jumlah SPALD Regional	Belum ada data terkait kegiatan ini	Dinas PSDA	-
	1.c.4	Total kapasitas SPALD Regional	Belum ada data terkait kegiatan ini	Dinas PSDA	-
	1.c.4	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Belum ada data kegiatan terkait ini	Dinas PSDA	-
	1.c.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	7SPALD/IPLT Berfungsi	Dinas PSDA	-
	1.c.4	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Belum ada data kegiatan terkait ini	Dinas PSDA	-
	1.c.5	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	2014,23 KM	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	ADA	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang dibangun	14 KM	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yg dibangun	75 Meter	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	123.04 KM	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	100,6 Meter	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	47,39 KM	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yang direhabilitasi	2 Unit	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jalan yang dipelihara	759.24 KM	Dinas Bina Marga	-
	1.c.5	Panjang jembatan yang dipelihara	1339.3 M	Dinas Bina Marga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.c.6	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Dinas Bina Marga	-
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	120.683	Disperkimtan	-
	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	171	Disperkimtan	-
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	171	Disperkimtan	-
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	17	Disperkimtan	-
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Disperkimtan	-
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	Disperkimtan	-
				-	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Disperkimtan	-
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	17	Disperkimtan	-
	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-	Disperkimtan	-
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Disperkimtan	-
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Disperkimtan	-
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Disperkimtan	-
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	Disperkimtan	-
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	1.183,79	Disperkimtan	-
	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	13	Disperkimtan	-
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	319.72	Disperkimtan	-
	1.d.4	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	?	Disperkimtan	-
	1.d.4	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	15	Disperkimtan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.d.4	Jumlah pengembang yang teregistrasi	197	Disperkimtan	-
	1.d.4	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	15	Disperkimtan	-
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		Satpol PP	-
	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Satpol PP	-
	1.e.1	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi		Satpol PP	-
	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Satpol PP	-
	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Satpol PP	-
	1.e.1	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum		Satpol PP	-
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1 Dokumen	BPBD	-
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1 Dokumen	BPBD	-
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1 Dokumen	BPBD	-
	1.e.4	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota		BPBD	-
	1.e.4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota		BPBD	-
	1.e.5	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1 Dokumen	BPBD	-
	1.e.5	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	SK Tim	BPBD	-
	1.e.5	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi		BPBD	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.e.5	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Tersedia	BPBD	-
Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Dinas Sosial	-
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		Dinas Sosial	-
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	-
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi		Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga		Dinas Sosial	-
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	74,159 jiwa	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1,057 korban	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	24 kab/kota	Dinas Sosial	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	1.f.5	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	39,266 paket	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1,498 KK	Dinas Sosial	-
	1.f.5	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Tenaga tagana 1143 oran Tenaga pelopor 56 orang	Dinas Sosial	-
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
	2.a.1.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1 Dokumen	Disnakertrans	-
	2.a.1.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	93,17%	Disnakertrans	-
	2.a.1.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	3	Disnakertrans	-
	2.a.1.1	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	24 kabupaten/Kota	Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.		Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.		Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase penganggur yang dilatih		Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase penyerapan lulusan.		Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Persentase LPK yang terakreditasi		Disnakertrans	-
	2.a.1.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		Disnakertrans	-
Tenaga Kerja	2.a.1.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		Disnakertrans	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.a.2	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,69%	Disnakertrans	-
	2.a.2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	-	Disnakertrans	-
	2.a.2	Data tingkat produktivitas total.		Disnakertrans	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	1,67%	Disnakertrans	-
	2.a.3	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	49,79%	Disnakertrans	-
	2.a.3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	43616	Disnakertrans	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	43,58%	Disnakertrans	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	77,64%	Disnakertrans	-
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	38,47%	Disnakertrans	-
	2.a.3	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,44%	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah mogok kerja	7	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah penutupan perusahaan	0	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah perselisihan kepentingan	9	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah perselisihan hak	82	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah Perselisihan PHK	248	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	503	Disnakertrans	-
	2.a.3	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	18	Disnakertrans	-
	2.a.3	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada (4)	Disnakertrans	-
	2.a.3	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	Rp3.434.298	Disnakertrans	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.a.3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	23.81%	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	4	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	2	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	33216	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	16226	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	3	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	78	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	-	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	-	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	474	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	100,00%	Disnakertrans	-
	2.a.4	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	50,00%	Disnakertrans	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.a.4	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	100,00%	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	629	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	10430	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	9986	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	16200	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	14425	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	7767	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	3	Disnakertrans	-
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	40283	Disnakertrans	-
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	47 lembaga pemerintah	Dinas P3A & KB	-
	2.b.1	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	131 program 213 kegiatan	Dinas P3A & KB	-
	2.b.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 media massa	Dinas P3A & KB	-
			3 lembaga layanan	Dinas P3A & KB	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			-
	2.b.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas P3A & KB	-
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	38 lembaga layanan	Dinas P3A & KB	-
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	2 lembaga	Dinas P3A & KB	-
	2.b.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 program	Dinas P3A & KB	-
	2.b.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	16 layanan	Dinas P3A & KB	-
	2.b.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas P3A & KB	-
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	37 lembaga	Dinas P3A & KB	-
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	2 lembaga	Dinas P3A & KB	-
	2.c.1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	55 LPM	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.c.1	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tersalurkan	Dinas Ketahanan Pangan	-
				Dinas Ketahanan Pangan	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pangan	2.c.1	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	140 Ton		-
	2.c.1	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.c.1	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	12 Dokumen P2L	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.c.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1 dokumen peta FSVA	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.c.1	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.c.1	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	4 Kelompok pertanian keluarga	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.c.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan	-
	2.c.1	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan	-
Pertanahan	2.d.1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi		Disperkimtan	-
	2.d.1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		Disperkimtan	-
	2.d.1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur		Disperkimtan	-
	2.d.1	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya		Disperkimtan	-
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	57,95	Dishut & LH	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Lingkungan Hidup	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	57,95	Dishut & LH	-
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	57,95	Dishut & LH	-
	2.e.2	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	100	Dishut & LH	-
	2.e.2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	171,43	Dishut & LH	-
	2.e.2	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	-	Dishut & LH	-
	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	73,61	Dishut & LH	-
	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Dishut & LH	-
	2.e.2	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	100	Dishut & LH	-
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Fasilitasi pelayanan Adminduk		Disdukcapil	-
	2.g.1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 desa	Dinas PMD	-
				Dinas PMD	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa kriteria tertinggal yang melakukan kerja sama desa pada tahun 2023 =0 desa dikurang jumlah desa kriteria tertinggal yang melakukan kerja sama desa tahun 2022 = 2 desa menjadi -2		-
	2.g.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2 desa	Dinas PMD	-
	2.g.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	91 desa	Dinas PMD	-
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Dinas P3A & KB	-
	2.h.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		Dinas P3A & KB	-
	2.h.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Dinas P3A & KB	-
	2.h.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Dinas P3A & KB	-
	2.h.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Dinas P3A & KB	-
	2.h.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		Dinas P3A & KB	-
	2.h.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Dinas P3A & KB	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.h.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Dinas P3A & KB	-
	2.h.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		Dinas P3A & KB	-
	2.h.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		Dinas P3A & KB	-
	2.h.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		Dinas P3A & KB	-
Perhubungan	2.i.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	43,75%	Dinas Perhubungan	-
	2.i.1	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	100%	Dinas Perhubungan	-
	2.i.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan provinsi	0,93%	Dinas Perhubungan	-
	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Diskominfo, Persandian & Statistik	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Tersedia	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	116	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	95	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	95	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	45	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	95	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	95	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	39	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	45	Diskominfo, Persandian & Statistik	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	95	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	67	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedia	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.j.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Koperasi & UKM	-
			0,08	Dinas Koperasi & UKM	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.k.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			-
	2.k.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,03	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,04	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,01	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,01	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,01	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,01	Dinas Koperasi & UKM	-
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,01	Dinas Koperasi & UKM	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.k.1	keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			-
	2.k.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0,04	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	1	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0,7	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,02	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,005	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,01	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.k.2	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0,02	Dinas Koperasi & UKM	-
	2.l.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Perda No 3 tahun 2021 tentang pemberian insentif dan/pemberian kemudahan investasi	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Penanaman Modal	2.1.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	pada tahun 2023 telah diterbitkan pergub No 47 tahun 2023 tentang tata cara pengajuan permohonan, penilaian, dan pelaksanaan pemberian insentif dan/pemberian kemudahan investasi.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Sejauh ini belum dilaksanakan evaluasi, baru sampai pada tahap pelaksanaan sosialisasi perda	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	3 kali	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1 kegiatan pameran	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4 kali	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Yang diterima sebanyak 81 kali	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Yang diterbitkan sebanyak = 40.534, yang terdiri dari 14.851 dokumen perizinan dan 25.683 dokumen non perizinan	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 16,451 T	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Tidak ada aparatur penanaman modal kab/kota yang dibina	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.1.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang telah diawasi sebanyak 385 perusahaan	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
	2.1.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak 4 surat permintaan	Dinas Penanaman Modal & PTSP	-
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	9397	Dispورا	-
	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	10	Dispورا	-
	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	10678	Dispورا	-
	2.m.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	54382	Dispورا	-
	2.m.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	1399	Dispورا	-
	2.m.3	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	396	Dispورا	-
	2.m.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	31	Dispورا	-
	2.m.3	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	55	Dispورا	-
	2.m.3	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	25	Dispورا	-
	2.n.1, 2.n.2	Tersedianya buku profil daerah	Tersedia	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	Diskominfo, Persandian & Statistik	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Statistik	2.n.1, 2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	10	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	34	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.n.1, 2.n.2	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	34	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
Persandian	2.o.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	50	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.o.1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	87,1	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.o.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.o.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	Diskominfo, Persandian & Statistik	-
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	3	Disbudpar	-
				Disbudpar	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kebudayaan	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	3		-
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0	Disbudpar	-
	2.p.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	3	Disbudpar	-
	2.p.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	10	Disbudpar	-
	2.p.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	2	Disbudpar	-
	2.p.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disbudpar	-
	2.p.1	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	0	Disbudpar	-
	2.p.1	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	Disbudpar	-
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	536	Disbudpar	-
	2.p.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	2.013+37.860+14.742=54.62534	Disbudpar	-
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2	Disbudpar	-
	2.p.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6	Disbudpar	-
	2.p.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	11	Disbudpar	-
	2.p.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	7	Disbudpar	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	2.p.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	63	Disbudpar	-
	2.p.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	3	Disbudpar	-
	2.p.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	17	Disbudpar	-
	2.p.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	3	Disbudpar	-
Perpustakaan	2.q.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.1	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.q.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.1	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Perpustakaan & Arsip	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kearsipan	2.r.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
	2.r.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		Dinas Perpustakaan & Arsip	-
URUSAN PILIHAN					
	3.a.1	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (wpp)	1 (713) WPP	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	484	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.1	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	89,47%	Dinas Perikanan & Kelautan	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5- 30 GT	SIUP = 484 unit kapal BPKP = 685 unit kapal	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.1	Jumlah kapal yang terdaftar	997 Unit Kapal	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	25	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	6.13%	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	38,46%	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	554	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	7	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	7	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	5	Dinas Perikanan & Kelautan	-
	3.a.2	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	52	Dinas Perikanan & Kelautan	-
					Dinas Perikanan & Kelautan

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.a.2	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	5		-
Pariwisata	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	989	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	668,862,806,447	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	668,862,805,447	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	201	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2.00	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1.53	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15,863	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	10,262,660	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	2	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	129	Disbudpar	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	4.14	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	23.04	Disbudpar	-
	3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2	Disbudpar	-
Pertanian	3.c.1, 3.c.2	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Dokumen pengawasan benih yang beredar		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Prasarana pertanian yang digunakan		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Penerbitan izin usaha pertanian		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Persentase sarana pertanian yang digunakan		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
	3.c.1, 3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.c.1, 3.c.2	Persentase jumlah usulan usaha pertanian		Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	-
Kehutanan	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	66,67	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	4.756	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0,005	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0,0004	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	26,96	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	-	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	-	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	-	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	62,7	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	1,3	Dishut & LH	-

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	0	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	553	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	Dishut & LH	-
	3.d.1, 3.d.2, 3.d.3	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1	Dishut & LH	-
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait IUJP	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	1	Dinas ESDM	-
				Dinas ESDM	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Tidak Ada		-
	3.e.1, 3.e.2	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	43 rekomendasi teknis	Dinas ESDM	-
	3.e.1, 3.e.2	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	537 Rumah Tangga	Dinas ESDM	-
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		Disperindag	-
				Disperindag	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk			-
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		Disperindag	-
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru		Disperindag	-
	3.f.1	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor		Disperindag	-
	3.f.2	Jumlah penanganan pengaduan konsumen		Disperindag	-
	3.f.2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi		Disperindag	-
	3.f.3	Jumlah komoditi potensial yang dipantau		Disperindag	-
	3.f.3	Indeks Kinerja BPSMB		Disperindag	-
	3.f.4	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan		Disperindag	-
	3.f.4	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan		Disperindag	-
				Disperindag	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.f.4	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan			-
	3.f.4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat		Disperindag	-
	3.f.4	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		Disperindag	-
	3.f.5	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi		Disperindag	-
	3.f.6	Jumlah barang beredar yang diawasi		Disperindag	-
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi		Disperindag	-
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi		Disperindag	-
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri		Disperindag	-
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani		Disperindag	-
	3.f.7	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		Disperindag	-
				Disperindag	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	3.f.7	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag			-
Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		Disperindag	-
	3.g.3, 3.g.4	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan		Disperindag	-
	3.g.3, 3.g.4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri besar yang diterbitkan		Disperindag	-
	3.g.3, 3.g.4	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		Disperindag	-
	3.g.6	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota		Disperindag	-
	3.g.3, 3.g.4	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota		Disperindag	-
Transmigrasi	3.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Disnakertrans	-
	3.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	8	Disnakertrans	-
	3.h.1	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	7	Disnakertrans	-

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci (Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan)

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDEKS CAPAIAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	11,09	Badan Keuangan & Aset Daerah	
	4.a.2	Rasio PAD	54,69	Dinas Pendapatan Daerah	
	4.a.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditure)	57,16	Badan Keuangan & Aset Daerah	
	4.a.4	Opini Laporan Keuangan	WTP	Badan Keuangan & Aset Daerah	
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
	4.a.6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Inspektorat	
Pengadaan	4. i. 1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Tidak terdapat kontrak dibawa ke tahun berikutnya	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	4. i. 2	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	22,58	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	4. i. 3	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	23,94	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. i. 4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	4,30	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
Kepegawaian	4. j. 1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	78,31	Badan Kepegawaian Daerah	
	4. j. 2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	29,15	Badan Kepegawaian Daerah	
	4. j. 3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	100	Badan Kepegawaian Daerah	
Manajemen Keuangan	4. k. 1	Budget execution : Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total Dalam APBD	7,53	Badan Keuangan & Aset Daerah	
	4. k. 2	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,15	Badan Keuangan & Aset Daerah	
	4. k. 3	Assets Managemen	Tersedia : 1. Daftar Aset Tetap 2. Manual menyusun daftar aset	Badan Keuangan & Aset Daerah	

Indeks Capaian	No IKK	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ke t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			tetap 3. Proses inventarisasi asset tahunan 4. Nilai asset tercantum dalam neraca		
	4. k. 4	Cash Management : Rasio anggaransisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,01	Badan Keuangan & Aset Daerah	
Transparansi dan Partisipasi Publik	4. 1. 1	Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	91,58	Badan Keuangan & Aset Daerah	
	4. 1. 2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Badan Keuangan & Aset Daerah	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2.3.1 Capaian IKU Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja utama Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 semakin menunjukkan perbaikan kinerja, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81-90)	BB(74,21)	91,61	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
2	Nilai SAKIP	A (>81-90)	B (68,78)	84,91	Tinggi
3	Indeks Pelayanan Publik	A (4,51-5,0)	A- (4,34)	96,23	Sangat Tinggi
4	Indeks Williamson	0,607	0,570	106,49	Sangat Tinggi
5	Indeks Layanan Infrastruktur	83,4	85,33	102,31	Sangat Tinggi
6	PDRB Perkapita AHB	65,98	69,70	105,63	Sangat Tinggi
7	Tingkat Kemiskinan	7,45	8,70	83,22	Tinggi
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,69	4,33	160,96	Sangat Tinggi
9	Rasio Gini	0,381	0,377	101,05	Sangat Tinggi
10	Indeks Pembangunan Manusia	73,05	74,06	101,38	Sangat Tinggi
11	Indeks Pendidikan	67,05	66,81	99,64	Sangat Tinggi
12	Indeks Kesehatan	77,86	78,80	101,20	Sangat Tinggi
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,23	76,37	98,88	Sangat Tinggi
14	Angka Kriminalitas	24.438	23.455	108,38	Sangat Tinggi
15	Pertumbuhan Ekonomi	5,04 - 6,52	4,51	89,48	Tinggi
16	Produktifitas Total Daerah	77.349.122	79.961.555	103,37	Sangat Tinggi
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,84	74,30	102	Sangat Tinggi
18	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1,347	1,66	123	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian IKU				169,06	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 18 (delapan belas) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja **169,06%** atau kriteria “**Sangat Tinggi**”.

2.3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Berikut ini akan diuraikan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023:

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah sebagai sasaran yang harus dicapai dengan tujuan untuk Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Penetapan Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang

Berorientasi Melayani dan Inovatif. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP dengan analisis sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP	A (>81-90)	B (68,78)	84,91%

Nilai SAKIP diperoleh melalui Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 84,91%, dengan kriteria Tinggi.

Walaupun terus mengalami peningkatan nilai, target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 belum tercapai sesuai harapan. Hal ini dikarenakan Tahun 2023 sebagai tahun terakhir RPJMD, ditargetkan Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa mencapai nilai 81-90 atau predikat A, namun Nilai SAKIP di Tahun 2023 hanya tercapai 68,78 atau Predikat B dengan capaian 84,91%.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sesuai Surat Nomor B/544/AA.05/2023 tanggal 27 Nopember 2023, diperoleh hasil evaluasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	23,99
B	Pengukuran Kinerja	30	18,02
C	Pelaporan Kinerja	15	10,89
D	Evaluasi Internal	25	15,88
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,08

	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B
--	--------------------------------------	----------

Sumber Data: Hasil Evaluasi Kemenpanrb 2023

Tabel di atas menggambarkan nilai SAKIP yang diperoleh berdasarkan komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja (23,99%), Pengukuran Kinerja (18,02%), Pelaporan Kinerja (10,89%) dan Evaluasi Internal (15,88%).

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP	B (65,06)	B (63,02)	B (65,01)	B (68,08)	B (68,78)

Sumber Data: Data diolah

Nilai SAKIP selama 5 (lima) tahun terakhir masih pada predikat B, secara nilai mengalami peningkatan. Tahun 2019 memperoleh nilai 65,06 namun di Tahun 2020 terjadi penurunan nilai sebanyak 2 poin yaitu 63,02. Selanjutnya Tahun 2021 meningkat sebanyak 1,99 poin menjadi 65,01, Tahun 2022 meningkat sebanyak 3,07 poin dengan nilai 68,08 dan Tahun 2023 meningkat 0,7 poin menjadi 68,78.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka menengah, dan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai SAKIP	B (68,78)	BB (> 70-80)	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, Nilai SAKIP yang diperoleh Tahun 2023 (B) masih belum menunjukkan hasil yang positif, nilai yang diharapkan belum dapat dicapai (BB).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Predikat B dengan nilai 68,78. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "baik", yaitu implementasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian Perangkat Daerah utama.

Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah didukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022 dari 36 Perangkat Daerah yang dievaluasi terdapat 17 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP A (47,2%), 18 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP BB (50%) dan 1 Perangkat Daerah memperoleh nilai SAKIP B (2,8%)

Berdasarkan hasil evaluasi, Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada setiap komponen penilaian sebagaimana penjelasan berikut:

1. Perencanaan kinerja

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah, namun masih perlu disempurnakan. Penetapan target pada sebagian Perangkat Daerah terlalu rendah dan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Pohon kinerja pada level Pemda dan Perangkat Daerah telah disusun, tapi masih diperlukan penyempurnaan dengan mengidentifikasi CSF atau faktor kunci keberhasilan yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi.

2. Pengukuran Kinerja

Catatan terkait pemanfaatan hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti, beberapa aplikasi yang digunakan belum seluruhnya terintegrasi. Selain itu, data sajian pengukuran tersebut juga masih terbatas pada realisasi fisik dan keuangan sehingga belum dikaitkan dengan kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Terdapat formulasi indikator yang belum relevan dengan indikator kerjanya.

3. Pelaporan Kinerja

Tindak lanjut dalam peningkatan kualitas laporan kinerja pada Perangkat Daerah belum dilakukan secara optimal. Laporan Kinerja seharusnya memuat informasi yang memadai dalam hal pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kualitas Laporan Hasil Evaluasi atas evaluasi internal yang telah dilakukan belum sepenuhnya memiliki kedalaman analisis yang merata, selain itu perlu memastikan catatan yang diberikan adalah yang relevan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

Dari uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melanjutkan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan berkala untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan level Perangkat Daerah telah spesifik, berorientasi hasil, menjawab mandat, dan terjaga ketepatan level pengampu kinerjanya serta selaras dengan isu strategis;
2. Melakukan peninjauan atas capaian target berdasarkan hasil pengukuran kinerja berkala agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan target di periode berikutnya agar tetap memicu peningkatan kinerja;
3. Memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan logical framework yang menggambarkan hubungan "sebab-akibat" dan berdasarkan CSF antar level kondisi kinerja yang dijabarkan sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level di atasnya;
4. Memastikan proses integrasi data yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi maupun individu segera selesai. Kemudian memastikan informasi yang dihasilkan tidak terbatas pada realisasi fisik dan serapan anggaran namun juga mengaitkan dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam PK sehingga nantinya dapat diandalkan dalam penilaian kinerja hingga level individu;
5. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit satuan kerja untuk memanfaatkan data hasil aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana pengukuran capaian kinerja, sehingga pimpinan dapat memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
6. Memastikan setiap kinerja pada Pemda maupun Perangkat Daerah telah dilengkapi indikator kinerja, kemudian menyempurnakan indikator tersebut agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup dalam mengukur pencapaian kinerja, serta memastikan relevansi formulasi perhitungan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan;
7. Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja baik pada level Pemda dan Perangkat Daerah dengan kedalaman informasi yang merata dan memadai, seperti eksplorasi analisis faktor pendorong atau penghambat dalam pencapaian kinerja, analisis program/kegiatan yang mendorong capaian kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Mendorong Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun rekomendasi yang spesifik dan relevan sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing Perangkat Daerah dan melakukan fungsi asistensi terkait tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
9. Mendorong keterlibatan seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari pihak internal Pemda maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi *crosscutting* dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan *logical framework* kemiskinan yang dimiliki.

Berdasarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut dari Tim Evaluator SAKIP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Telah menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan selanjutnya melakukan evaluasi mengacu pedoman yang telah disusun tersebut;
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor (CSF) sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja;
3. Menerapkan kebijakan reward and punishment atas penilaian akuntabilitas internal pada Perangkat Daerah dengan nilai tertinggi dan terendah.
4. Telah menyempurnakan Laporan Kinerja pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah dengan menyajikan informasi yang memadai terkait dengan capaian kinerja dan faktor penghambat maupun pendukung pencapaian kinerja;
5. Melakukan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah dengan melakukan penyempurnaan terhadap kedalaman informasi yang merata dan memadai, seperti eksplorasi analisis faktor pendorong atau penghambat dalam pencapaian kinerja, saran solusi yang dilakukan, analisis program/kegiatan yang mendorong capaian kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya
6. Melakukan Studi Tiru Implementasi SAKIP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pembelajaran dalam rangka peningkatan nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Melakukan konsultasi dan koordinasi sebagai Tim Evaluator Daerah Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tim Evaluator Kementerian PANRB.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp.73.527.482.541 dengan realisasi sebesar Rp.65.016.191.067 atau 92,16%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 84,91% terdapat inefisiensi sebesar 7,25%.

Tabel 2.7
Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.521.006.800	1.721.283.700	48,89
2	Program Kepegawaian Daerah	3.646.451.300	3.464.394.177	95,01
3	Program Penataan Organisasi	2.142.772.300	1.992.119.438	92,97
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.286.454.600	12.686.841.057	95,49
5	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	14.227.343.484	13.042.486.840	91,67
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8.075.727.092	6.892.254.099	85,35
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	21.425.209.440	21.012.414.826	98,07
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.220.054.500	4.204.396.930	99,63
Jumlah		73.527.482.541	65.016.191.067	92,16

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2023 unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran startegis ini adalah dengan melakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Kepegawaian Daerah dan Program Penataan Organisasi, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Program Administrasi Pemerintahan Desa, selain itu juga telah dilakukan evaluasi SAKIP bagi seluruh Perangkat Daerah melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan. Program-program tersebut ditunjang oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan

NO	Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2	Program Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3	Program Penataan Organisasi	1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
5	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 2. Fasilitasi Bantuan Hukum
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

SASARAN 2
Berkembangnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Penetapan Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kesatu sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan analisis sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pelayanan Publik	A (4,51 - 5,0)	A- (4,34)	96,23

Sumber Data: Kementerian PANRB

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik dengan target A (4,51 – 5,0), realisasi Tahun 2023 A- (4,34) dengan capaian 96,23% belum dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan meskipun tingkat capaian masuk kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan 5 (lima) tahun terakhir untuk indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pelayanan Publik	B	A-(4,015)	A-(4,10)	A-(4,34)	A-(4,34)

Tabel di atas menggambarkan pencapaian Indeks Pelayanan Publik dari tahun ke tahun cenderung meningkat, Tahun 2023 memperoleh nilai A- (4,34) nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan nilai B, Tahun 2020 dengan nilai A- (4,015), Tahun 2021 dengan nilai A- (4,10) dan Tahun 2022 nilai A- (4,34).

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks Pelayanan Publik	A- (4,34)	B (3,53 - 4)	-

Realisasi Kinerja Tahun 2023 untuk indikator Indeks Pelayanan Publik memperoleh nilai sebesar 4,34 dengan Mutu Layanan A- telah mampu melewati target Jangka Menengah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang diterima oleh Biro Organisasi, terdapat 34 UPP dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	IKM	Kategori
1	Dinas Sosial	B (Baik)	80,85
2	Dinas Ketahanan Pangan	B (Baik)	88,39
3	Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi	B (Baik)	78,11
4	UPT Pendapatan Wilayah Barru	B (Baik)	81,501
5	UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng	B (Baik)	77,77
6	UPT Pendapatan Wilayah Bone	B (Baik)	80,047
7	UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba	B (Baik)	81,287
8	UPT Pendapatan Wilayah Enrekang	B (Baik)	85,431
9	UPT Pendapatan Wilayah Gowa	B (Baik)	83,896
10	UPT Pendapatan Jeneponto	B (Baik)	77,00
11	UPT Pendapatan Luwu Timur	B (Baik)	85,029
12	UPT Pendapatan Luwu	C (Kurang Baik)	76,09
13	UPT Pendapatan Wilayah Makassar II	B (Baik)	81,4
14	UPT Pendapatan Wilayah Maros	B (Baik)	80,86
15	UPT Pendapatan Wilayah Palopo	B (Baik)	80,13
16	UPT Pendapatan wilayah Pangkep	B (Baik)	82,5
17	UPT Pendapatan Wilayah Pare-Pare	B (Baik)	89,93
18	UPT Pendapatan Wilayah Pinrang	B (Baik)	78,88
19	UPT Pendapatan Wilayah Selayar	B (Baik)	84,16
20	UPT Pendapatan Wilayah Sidrap	B (Baik)	83,026
21	UPT Pendapatan Wilayah Sinjai	B (Baik)	82,14
22	UPT Pendapatan Wilayah Soppeng	B (Baik)	88,3
23	UPT Pendapatan Wilayah Takalar	B (Baik)	83,93
24	UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja	B (Baik)	88,3
25	UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara	B (Baik)	80,85

26	UPT Pendapatan Wilayah Wajo	B (Baik)	84,55
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	B (Baik)	85,81
28	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	B (Baik)	80,85
29	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	B (Baik)	84,42
30	Perpustakaan Umum	B (Baik)	77,00
31	Badan Penghubung Daerah	A (Sangat Baik)	90,05
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (Sangat Baik)	90,00
33	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda	B (Baik)	82,56
34	Biro Hukum Setda	B (Baik)	85,10
NILAI RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		B (Baik)	82,97

Dari tabel di atas, nilai tertinggi dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023 diraih oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 90,05 (A) kategori Sangat Baik. Pada urutan kedua diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 90,00 (A) Sangat Baik. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 82,97. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 34 UPP (yang berasal dari 10 OPD) telah menyampaikan Laporan SKM.
3. Dari 34 UPP yang telah melaporkan hasil SKM, terdapat 32 UPP yang telah menyusun rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Sedangkan 2 UPP lainnya belum menuangkan dalam bentuk rencana tindak lanjut secara tertulis, namun telah memahami bahwa rencana tindak lanjut disusun berdasarkan prioritas nilai terendah hasil survei kepuasan Masyarakat.
4. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Dan Bumn Tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan kelima nasional setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan Pelayanan Publik ke depan yaitu:

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap Unit Kerja sehingga bisa meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian khusus kepada Unit kerja yang memiliki unsur yang relatif rendah dibanding unsur yang lain pada setiap unit kerja.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang terkait langsung dengan pemberi layanan, perlu terus dilakukan secara berkala, baik diklat maupun pembinaan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana unit kerja pelayanan.
5. Meningkatkan transparansi dalam pemberian layanan, penjelasan yang memadai serta SOP yang jelas pada setiap Unit Kerja Pelayanan.
6. Memastikan terjadinya peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
7. Melakukan survey secara berkala agar instansi Unit Layanan dapat melakukan perbaikan layanan sesuai dengan penilaian dan kebutuhan.
8. Melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap unit kerja.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 Program sebesar Rp.35.899.243.534. dengan realisasi sebesar Rp.31.179.197.424, atau 86,85%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,23%, berarti terdapat efisiensi sebesar 10,80%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.356.774.754	1.985.484.542	59,15
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	32.099.557.080	28.823.217.011	89,79
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	442.911.700	370.495.871	83,65
	Jumlah	35.899.243.534	31.179.197.424	86,85

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2023 unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran strategis ini adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana unit kerja pelayanan, mendorong setiap unit kerja untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, melalui Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan

Program Pelayanan Penanaman Modal. Program-program tersebut ditunjang oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

NO	Program	Kegiatan
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
2	Program Layanan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

SASARAN 3

Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Layanan Infrastruktur dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Indeks Aksesibilitas Infrastruktur diuraikan pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Layanan Infrastruktur	83,40	85,33	102,31%

Realisasi capaian kinerja Indeks Infrastruktur Tahun 2023 adalah 85,33 atau 102,31%, capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini melampaui target (83,40) dan masuk dalam kriteria ***Sangat tinggi***.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Layanan Infrastruktur	63,07	77,79	79,44	81,48	85,33

Perkembangan Indeks Layanan Infrastruktur kurun waktu Tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Untuk Tahun 2023 realisasi indikator kinerja Indeks Layanan Infrastruktur (85,33) cenderung mengalami peningkatan jika dibanding dengan Tahun 2019 (63,07), Tahun 2020 (77,79), Tahun 2021 (79,44), dan Tahun 2022 (81,48).

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2023 dengan target jangka menengah tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks Layanan Infrastruktur	85,33	73	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2023 (85,33) telah jauh melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan (73).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indeks layanan infrastruktur yang dikontribusikan dengan konektivitas wilayah berupa kemantapan jalan provinsi dan persentase kecamatan terhubung jalan provinsi yang dapat dilalui kendaraan roda empat; ketersediaan jaringan irigasi yang mampu melayani lahan pertanian; dan keterpenuhan listrik di perdesaan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan layanan infrastruktur yang terindikasi dengan meningkatnya kemantapan jalan provinsi, meningkatnya wilayah yang terjangkau oleh jaringan jalan provinsi dan meningkatnya layanan jaringan irigasi. Sejak Tahun 2022 terdapat penambahan komponen penghitung Indeks Layanan Infrastruktur yaitu persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi sebagai indikator infrastruktur layanan dasar

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Layanan Infrastruktur antara lain adalah:

- 1) Tersedia dan berfungsinya simpul transportasi berupa pelabuhan pengumpan regional dan terminal pada pusat kegiatan;
- 2) Meningkatnya kualitas dan layanan jaringan irigasi yang melayani lahan pertanian di Sulawesi Selatan yang diindikasikan dengan persentase luas lahan budidaya pertanian yang terlayani oleh jaringan irigasi yang meningkat dari 22,60% pada Tahun 2022 menjadi 23,98% pada Tahun 2023;
- 3) Meningkatnya kemantapan jalan provinsi yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kondisi jalan pada Tahun 2023 yaitu jalan provinsi kondisi baik sepanjang 948.74 Km (47,1%) dan jalan provinsi kondisi sedang sepanjang 569,51 Km (28,27%);

Upaya-upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pencapaian target Indeks Layanan Infrastruktur adalah:

1. Mengoptimalkan penanganan jalan pada kondisi rusak ringan dengan meningkatkan kondisinya menjadi sedang.
2. Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan.
3. Mengoptimalkan upaya koordinasi dengan UPT Kementerian Perhubungan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan regional.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 6 Program sebesar Rp.290.129.729.317 dengan realisasi sebesar Rp.255.343.581.819 atau 88,01%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,31%, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 16,25%.

**Tabel 2.13
Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Jalan	204.885.567.428	188.106.108.393	91,81
2	Program Pengelolaan Pelayaran	933.586.790	891.189.751	95,46
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.201.126.164	1.765.515.206	80,21
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	67.929.519.771	52.655.600.989	77,52
5	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU	13.782.613.164	11.813.288.550	85,71
6	Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	397.316.000	111.878.930	28,16
Jumlah		290.129.729.317	255.343.581.819	88,01

Sumber: Laporan Keuangan TA. 2023 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran startegis ini antara lain adalah melakukan peningkatan kondisi jalan yang melalui Program Penyelenggaraan Jalan, melakukan koordinasi dengan UPT Kementerian Perhubungan yang saat ini masih melakukan pengelolaan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional melalui Program Pengelolaan Pelayaran. Program-program tersebut ditunjang oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
2	Program Pengelolaan Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi 2 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional 3 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 4 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab/Kota
5	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
6	Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota

**Sasaran 4
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka diuraikan pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,69	4,33	162,81%

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dengan target 5,69 dapat direalisasikan sebesar 4,33 atau 162,81% dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

a. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,97	6,31	5,72	4,51	4,33

Perkembangan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2019 berada pada angka 4,97 di Tahun 2020 awal Pandemi COVID-19 terjadi peningkatan di angka 6,31 untuk selanjutnya di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 terjadi tren positif penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

b. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,33	6,08	5,27

Tahun 2023 realisasi kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka diperoleh nilai yaitu 4,33% angka tersebut telah melewati target jangka menengah yaitu 6,08% dan Target Nasional yaitu 5,27%.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Menurut Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2023 sebesar 4,33%, turun sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Keberhasilan tercapainya Tingkat Pengangguran Terbuka yang terus menurun pasca pandemi Covid-19 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing. Pelatihan tenaga kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian individu atau kelompok sehingga tenaga kerja lebih mudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga membantu mengurangi ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja.
- 2) Peningkatan Jumlah Lowongan Pekerjaan di Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yaitu 16.226 Lowongan Pekerjaan yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota. Ketersediaan lapangan pekerjaan ini naik 2.632 dibanding Tahun 2022, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja naik 1.566, yaitu 33.216 tenaga kerja yang ditempatkan. Pada Tahun 2023, jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat karena didukung oleh penyelenggaraan Job Fair yang salah satunya dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah penempatan tenaga kerja adalah 746 tenaga kerja pada 12 perusahaan.

Adapun permasalahan umum yang dihadapi dalam penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain:

1. Ketidakstabilan ekonomi, seperti resesi atau fluktuasi siklus bisnis, dapat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja dan peningkatan tingkat pengangguran. Penanggulangan TPT sering memerlukan kebijakan makroekonomi yang tepat, termasuk stimulus fiskal dan moneter, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil.
2. Ketidaksesuaian Keterampilan, salah satu tantangan utama dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka adalah mengatasi ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan permintaan tenaga kerja di pasar. Hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Kurangnya Kesempatan Kerja, kurangnya lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Penanggulangan TPT seringkali melibatkan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan investasi, menciptakan kondisi yang mendukung untuk bisnis dan industri baru, serta memperluas kesempatan kerja.
4. Pasar Kerja Informal yang Besar, penanggulangan TPT melibatkan upaya untuk formalisasi ekonomi informal, yang dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja yang stabil dan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja.
5. Belum maksimalnya penyediaan informasi pasar dan bursa kerja di kabupaten/kota karena

masih terdapat perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya.

6. Beberapa operator sistem online yang sudah dilatih untuk kegiatan pasar dan bursa kerja di kabupaten/kota mengalami mutasi atau pindah jabatan.
7. Beberapa Perusahaan yang ada di kabupaten/kota belum kooperatif dalam melaporkan rencana penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.
8. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam hal penyediaan data yang terkait dengan tenaga kerja (pengangguran, lowongan, penempatan AKAD/AKL, PMI, TKA) belum optimal dalam memberikan perhatian dan pembinaan.
9. Desa/Kelurahan adalah tempat asal keberangkatan calon TKI/PMI sehingga dibutuhkan alokasi anggaran untuk melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi perangkat desa/kelurahan yang menjadi kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Membangun sinergitas dengan dinas kabupaten/kota maupun perusahaan untuk mendapatkan data ketenagakerjaan (pengangguran, lowongan, penempatan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja antar daerah, PMI dan TKA).
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang menangani disabilitas dan menyatukan format pendataan swasta, menyamakan persepsi dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas di provinsi/ kabupaten/kota.
3. Menyiapkan anggaran untuk alokasi kegiatan Sosialisasi Penggunaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada instansi dan perusahaan sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
4. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyampaikan ke Perusahaan agar melaporkan lowongan dan penyerapan tenaga kerja melalui aplikasi IPK Online yaitu **e-bursakerja.kemnaker.go.id** atau **karierhub.go.id** untuk efisiensi dan menciptakan satu sumber data, serta meningkatkan sinergitas antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait pembinaan dan penganggaran yang belum mampu disiapkan oleh provinsi dan kabupaten/kota.
5. Penduduk yang bekerja masih didominasi penduduk berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah, untuk itu perlu dilakukan penanganan yang lebih serius dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pemberian pelatihan keterampilan,
6. Mengadakan pelatihan peningkatan produktivitas dan kewirausahaan kepada calon-calon wirausaha muda agar tercipta entrepreneur, serta memberikan pelatihan berbasis kompetensi bagi para tenaga kerja maupun calon tenaga kerja.
7. Memberikan perhatian dan dukungan yang lebih pada sektor informal agar lebih berkembang dimana berdasarkan data, pekerja sektor informal lebih besar dibanding sektor formal.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 7 Program sebesar Rp.39.770.030.287 dengan realisasi sebesar Rp.28.908.602.517, atau 72,69%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 162,81%, tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 90,12%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.726.894.700	1.027.321.452	37,67
2	Program Pemasaran Pariwisata	8.391.283.100	5.819.548.319	69,35
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	21.741.559.036	16.727.117.479	76,94
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	410.692.451	383.415.773	93,36
5	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	3.768.745.000	2.454.443.574	65,13
6	Program Promosi Penanaman Modal	693.588.800	606.665.720	87,47
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.037.267.200	1.890.090.200	92,78
	Jumlah	39.770.030.287	28.908.602.517	72,69

Sumber Data: Laporan Keuangan TA. 2023 Unaudited

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang ditujukan untuk mengintervensi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan Tahun 2023 antara lain Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan capaian kinerja sub kegiatan, yaitu terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Pencari Kerja, Pelatihan Peningkatan Produktivitas, Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri, dan Pelatihan Disabilitas. Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Sub Kegiatan Job Fair dengan capaian kinerja sub kegiatan, yaitu tersedianya data lowongan bagi pencari kerja.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

No	Program	Kegiatan
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 3. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
6	Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

Sasaran 5

Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Antar Lapisan Masyarakat

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Gini Ratio dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Indeks Gini Ratio diuraikan pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Gini Ratio	0,381	0,377	101,05%

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS diperoleh hasil Indeks Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sebesar 0,377 dengan realisasi

capaian kinerja yaitu 101,05% belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan tetapi masih dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Untuk perbandingan realisasi Indeks Gini Ratio Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Gini Ratio	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,377. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022. Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,386, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,378 tetapi turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,324 dan juga naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,336.

**Perkembangan Indeks Gini
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023**

Indeks Gini	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Perkotaan	Indeks	0,393	0,384	0,387	0,378	0,386
Perdesaan	Indeks	0,354	0,352	0,334	0,324	0,339
Perkotaan + Perdesaan	Indeks	0,391	0,382	0,377	0,365	0,377

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

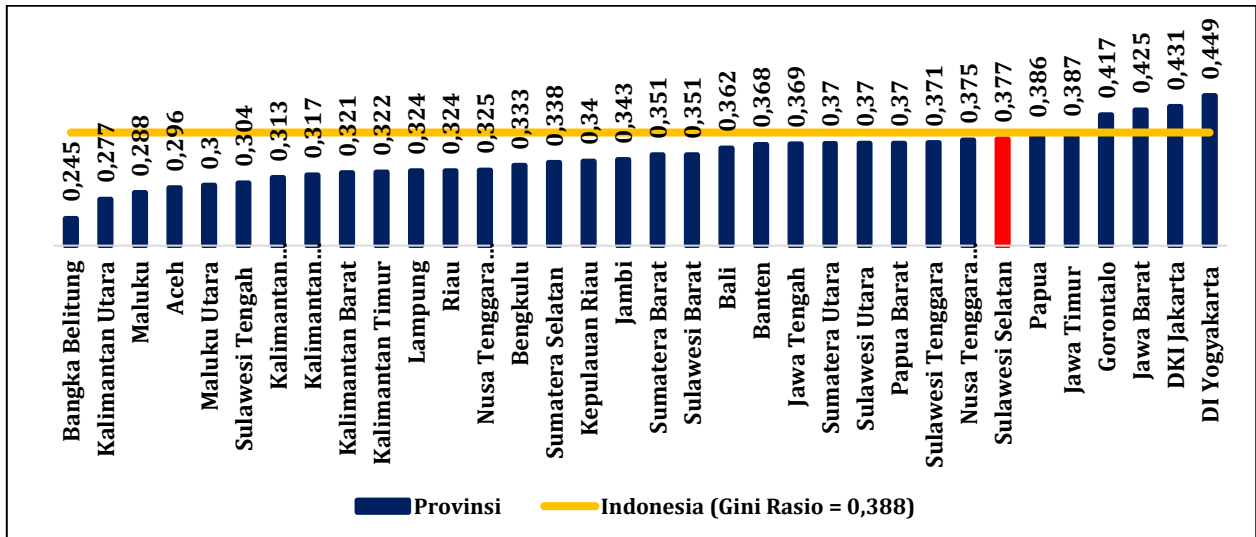
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks Gini Ratio	0,377	0,347	0,388

Indeks Gini Ratio Tahun 2023 berada pada angka 0,377 berada di atas target jangka menengah (0,347). Provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,449. Sementara Gini Ratio

terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,245. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional yang sebesar 0,388, Gini Ratio Sulawesi Selatan masih berada dibawah Nasional (0,388). Terdapat enam provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi daripada Gini Ratio Sulawesi Selatan yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), Gorontalo (0,417), Jawa Timur (0,387), dan Papua (0,386).

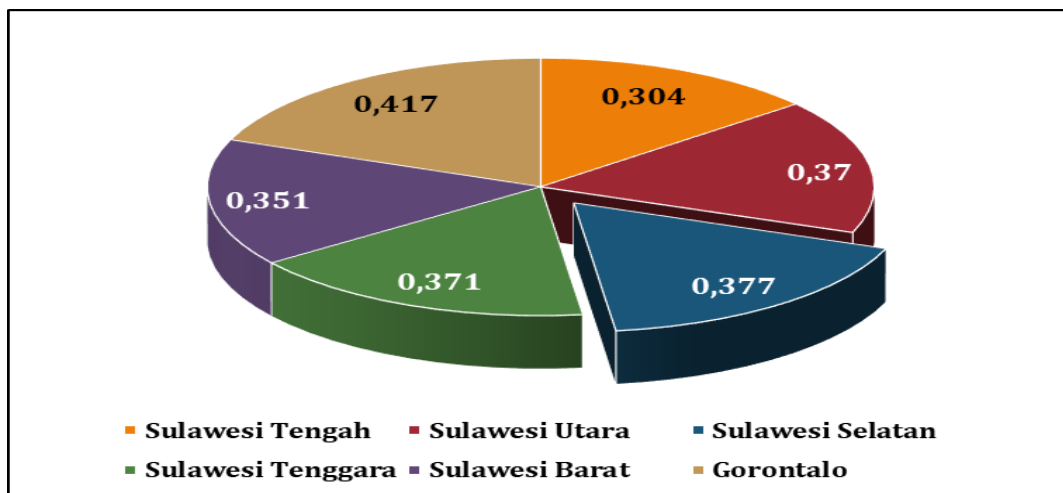
Grafik Perbandingan Indeks Gini Sulawesi Selatan dengan Provinsi Lain di Indonesia Maret 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain pada Regional Sulawesi, capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan masih lebih baik daripada Sulawesi Tenggara (0,371), Sulawesi Barat (0,351), dan Gorontalo (0,417), sebagaimana tergambar dalam diagram berikut

Diagram Perbandingan Indeks Gini Wilayah Regional Sulawesi Maret 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2024

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indeks Gini Rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisien gini mendekati satu. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita dari beberapa sektor antara lain: Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Industri Pengolahan menjadi faktor penurunan Indeks Gini dimana distribusi pendapatan yang semakin meningkat akan memperkecil ketimpangan.

Indeks Gini Ratio Sulawesi Selatan Tahun 2023 mencapai 0,377 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional, yang berada pada angka 0,388. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, juga memikul tanggung jawab yang besar. Tantangan yang dewasa ini sedang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang di dalamnya juga terdapat keberhasilan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Walaupun angka indeks Gini Rasio provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada indikasi yang relatif rendah, perkembangannya cenderung menurun pada tiap tahunnya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menurunkan Indeks Gini Ratio adalah:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berusaha mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Peningkatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita dari beberapa sektor antara lain Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Industri Pengolahan menjadi faktor penurunan Indeks Gini dimana distribusi pendapatan yang semakin meningkat akan memperkecil ketimpangan.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang di dalamnya juga terdapat keberhasilan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 9 Program sebesar Rp.481.058.115.231 dengan realisasi sebesar

Rp.391.798.831.982 atau 81,45%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,95%, berarti tingkat efisiensi pada sasaran ini adalah sebesar 21,48%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Kawasan Permukiman	3.630.970.400	1.376.328.823	37,91
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro UMKM	2.950.717.902	2.619.491.046	88,77
3	Program Pengembangan UMKM	6.446.662.800	3.455.749.400	53,61
4	Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	270.760.700	188.659.400	69,68
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100.000.000	99.992.000	99,99
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.977.249.700	2.813.823.910	94,51
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	457.525.899.729	374.683.945.476	81,89
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	6.693.796.300	6.189.660.465	92,47
9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	462.057.700	371.181.462	80,33
	Jumlah	481.058.115.231	391.798.831.982	81,45

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2023 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam rangka mengintervensi Indeks Gini Ratio di Sulawesi Selatan Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulasel telah mendorong pembukaan lapangan pekerjaan hingga pemerataan kesempatan bagi Masyarakat, melalui Program Kawasan Permukiman, Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro UMKM, Program Pengembangan UMKM, Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. Program-program tersebut ditunjang oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Kawasan Permukiman	1 Penataan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
3	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
4	Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigras	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sasaran 6

Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pendidikan dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Indeks Pendidikan” dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pendidikan	67,05	66,88	99,74

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 6, realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2023 adalah 66,88 dan capaian kinerja yaitu 99,74%, di bawah target yang ditetapkan yaitu 67,05 akan tetapi masih dalam kriteria **Sangat tinggi**.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pendidikan	64,64	65,29	65,76	66,35	66,88

Perbandingan Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 lebih baik dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

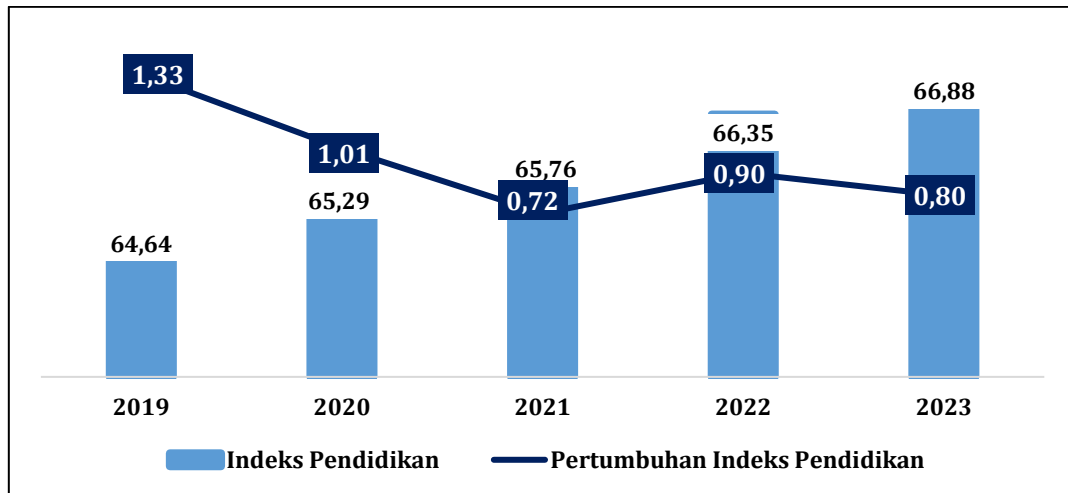
Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
I _{RLS}	Nilai	55,07	55,87	56,40	57,53	58,53
I _{HLS}	Nilai	74,22	74,72	75,11	75,17	75,22
Indeks Pendidikan	Nilai	64,64	65,29	65,76	66,35	66,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Adapun pertumbuhan Indeks Pendidikan di Tahun 2023 mengalami perlambatan atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,10 poin, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 2.1
Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks Pendidikan	66,88	68,5	-

Capaian realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2023 yaitu 66,35 belum dapat mencapai target jangka menengah yaitu 68,5.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Indeks pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS

diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh masa sekolah selama 8,76 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 2 hingga kelas 3 SMP. Selain itu indikator lainnya dalam dimensi pengetahuan adalah harapan lama sekolah. Rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 13,54 tahun ke depan atau setara dengan menyelesaikan pendidikan tinggi hingga diploma I. Jika dikaitkan antara RLS dan HLS, masyarakat Sulawesi Selatan masih memiliki harapan untuk bisa mengenyam pendidikan hingga sekitar 13 tahun atau hingga bangku kuliah setara diploma. Berdasarkan jenis kelamin, hampir semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, perempuan memiliki Angka Harapan Lama Sekolah yang lebih lama dibandingkan laki-laki, kecuali di Kabupaten Jeneponto dan Luwu Utara, dimana laki-laki memiliki Harapan Lama Sekolah yang lebih lama dibandingkan perempuan.

Faktor yang menunjang dalam peningkatan Indeks Pendidikan yaitu dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pada Pendidikan Khusus melalui Program Pengelolaan Pendidikan.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian target Indeks Pendidikan adalah:

1. Masih ada siswa SMP yang tamat tidak melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMA sederajat.
2. Adanya siswa usia sekolah di tingkat SMA (16 sampai 18 tahun) terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) belum terlayani karena keterbatasan satuan pendidikan yang terbentuk disebabkan faktor geografis yang sulit dijangkau.
3. Banyak orang tua yang masih menganggap asal sudah tahu baca, tulis, hitung, sudah bisa menjadi dasar untuk bekerja kasar yang bisa dengan segera menghasilkan uang.
4. Masih terdapat angka putus sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, letak geografis yang susah dijangkau, sumber daya manusia yang masih rendah dan lain lain.

Upaya-Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan Indeks Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan giat melaksanakan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat di masa depan,
2. Mengajak kepada orang tua siswa untuk mendorong dan memberi kesempatan anak-anaknya menikmati pendidikan minimal tamat di jenjang pendidikan SMA atau SMK, agar memiliki dasar-dasar keterampilan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga, serta
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Kab/Kota untuk berkoordinasi dengan stakeholder agar memperbanyak daya tampung melalui pembangunan Ruang Kelas dan atau pembukaan Satuan Pendidikan Satu Atap.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp.1.057.011.145.045 dengan realisasi sebesar Rp.723.631.247.799 atau 68,46%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,74%, berarti tingkat efisiensi sasaran ini adalah sebesar 45,69%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1.056.408.477.945	723.068.597.680	68,45
2	Program Pengembangan Kurikulum	602.667.100	562.650.119	93,36
	Jumlah	1.057.011.145.045	723.631.247.799	68,46

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2023 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Indek Pendidikan Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan giat melaksanakan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat di masa depan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pengembangan Kurikulum. Program-program tersebut ditunjang oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Pengelolaan Pendidikan SMA 2 Pengelolaan Pendidikan SMK 3 Pengelolaan Pendidikan Khusus
2	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

Sasaran 7
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mengukur sasaran

tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kesehatan dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Indeks Kesehatan” dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kesehatan	77,86	78,80	101,20

Data BPS terakhir memperlihatkan Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2023 adalah 78,80 dengan capaian sebesar 101,20%, melampaui target yang ditetapkan (77,86), kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya tergambar pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kesehatan	77,58	77,80	77,94	78,41	78,80

Indeks Kesehatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, Tahun 2019 nilai Indeks 77,58 kemudian meningkat di Tahun 2020 dengan nilai Indeks 77,80. Di Tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan nilai Indeks 77,94 demikian halnya di Tahun 2022 meningkat menjadi 78,41.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan target nasional, tergambar pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks Kesehatan	78,80	77,76	79,34

Indeks Kesehatan Tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah akan tetapi belum dapat mencapai target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Penilaian Indeks Kesehatan merupakan representatif dari Indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Meningkatnya UHH di suatu wilayah otomatis juga memberikan nilai ungkit terhadap indeks kesehatan di wilayah tersebut. Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja ini, antara lain:

1. Tersedianya sarana dan parasara pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta yang bermitra dengan BPJS yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan kesehatan secara merata dan mampu menciptakan akses pelayanan khususnya di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
2. Adanya Regulasi yang memperkuat sistem kesehatan Nasional maupun di daerah di tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
3. Dukungan anggaran di sektor kesehatan (bantuan dana stimulan/Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana bansos/sharing untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kesehatan gratis, dana tanggap bencana/KLB, Dana Pengentasan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim, dan lain-lain).
4. Meningkatnya kualitas dan mutu tenaga kesehatan dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan perbaikan manajemen SDM.
5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyediaan tenaga-tenaga kontrak spesialisik dan internship.
6. Adanya kelompok-kelompok UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) yang melaksanakan upaya surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, KIA, Gizi, Lingkungan dan Perilaku) dan Tingkat keaktifan kader Posyandu dalam menyampaikan promosi kesehatan melalui pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat.
7. Kemajuan teknologi informasi yang mempermudah penyampaian pesan-pesan kesehatan, berimbas kepada meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga dapat memperbanyak dan memperkuat jejaring/mitra dalam implementasi program/kegiatan pembangunan kesehatan.
8. Adanya aplikasi pelaporan berbasis elektronik yang diharapkan dengan efektif dan cepat diperoleh data keefektifan koordinasi data dan permasalahan kesehatan di masyarakat sehingga dapat mempermudah dalam proses analisa, pengambilan solusi/keputusan dan penentuan kebijakan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan Indeks Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program prioritas secara kontinu dengan kegiatan intervensi langsung pada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim, upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta percepatan penurunan stunting yang dituangkan dengan dibentuknya Tim

Percepatan Penanganan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Berbagai aspek strategis lain berupa kerjasama lintas sektor yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat Sulawesi Selatan yang mandiri dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Karena Pembangunan Kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan melainkan multi sektoral termasuk individu dan keluarga.
3. Komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan Dana Sharing untuk Pembiayaan Pelaksanaan Program Integrasi Jamkesda ke JKN yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga dapat mengakomodir kendala pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
4. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang bermitra dengan BPJS yang mendukung pelaksanaan Kesehatan serta merta dan mampu menciptakan akses pelayanan khususnya di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
5. Sinergitas lintas program/sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kesehatan.
6. Pendayagunaan tenaga Kesehatan secara professional dan proporsional serta advokasi ke Pemerintah Kab/Kota, agar tenaga Kesehatan yang telah dilatih dapat difungsikan secara maksimal.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 Program sebesar Rp.270.207.456.670 dengan realisasi sebesar Rp.215.410.208.868 atau 79,72%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,20%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 26,94%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	34.361.833.500	33.606.988.160	97,8
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.371.800.362	7.712.238.806	92,12
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	227.473.822.808	174.090.981.902	76,53
Jumlah		270.207.456.670	215.410.208.868	79,72

Sumber: Laporan Keuangan TA. 2023 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Indeks Kesehatan Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan program prioritas secara kontinu dengan kegiatan intervensi langsung pada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim, upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta percepatan penurunan stunting melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan. Program-program tersebut ditunjang oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sasaran 8

Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77, 23	76,37*	98,88%

Capaian nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023 masih menggunakan data Tahun 2022 (tahun sebelumnya) karena masih menunggu hasil rilis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk capaian nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2022 yaitu 76,37* masih rendah dibandingkan target Tahun 2023 namun persentasenya masuk dalam kategori Sangat Tinggi yaitu 98,88%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,01	76,32	76,24	76,37	76,37*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tren Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Selatan tiga tahun terakhir tahun 2019-2023. Dapat digambarkan lebih jauh bahwa sampai dengan Tahun 2021 IDG Sulawesi Selatan mengalami perkembangan cukup signifikan dimana tahun 2019 nilai indeks 76,01 sedangkan tahun 2021 mencapai nilai indeks 76,24 demikian juga pada Tahun 2022 dan Tahun 2023.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional

Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional

1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,37	77,23	76,26
---	----------------------------------	-------	-------	-------

Dengan melihat data di atas, tergambar bahwa target IGD Jangka Menengah (77,23) masih belum dapat dicapai. Jika dibandingkan nilai indeks IDG nasional, maka Sulawesi Selatan berada di atas nilai IDG, dan salah satu elemen yang mampu mendorong meningkatnya nilai IDG Sulawesi Selatan adalah proporsi keterlibatan perempuan di parlemen, yakni sampai dengan Tahun 2021 persentase perempuan di parlemen di Sulawesi Selatan sebesar 28% sedangkan nasional baru mencapai 21%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Capaian kinerja nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh melalui 3 komposit pembentuk IDG yaitu proporsi kursi yang diduduki perempuan di tingkat parlemen, keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini berarti bahwa perempuan cukup memainkan peran aktif dalam ekonomi dan politik melalui sumbangsih pendapatan perempuan dalam bidang ekonomi serta partisipasi aktif perempuan dalam parlemen. Kesetaraan gender di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri diharapkan terus menunjukkan tren positif dengan lebih memberikan kesempatan, ruang dan akses yang lebih kepada kaum perempuan dalam pembangunan seperti meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang kewirausahaan untuk mendukung sumbangan pendapatan perempuan.

Kementerian PPPA telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Salah satunya adalah memberikan penghargaan kepada Provinsi dan kabupaten/kota Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan ini berupa suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai untuk menunjukkan konsistensi dalam penerapan 7 prasyarat Pengarus Utamaan Gender (PUG) dimana implementasi penerapan tersebut terdiri:

1. Komitmen kepala daerah dalam mendukung penerapan PUG
2. Kebijakan daerah yang mendukung penerapan PUG
3. Kelembagaan Pokja PUG/Focal Point
4. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia terkait kapasitas perencanaan/program/bidang teknis dalam memahami PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta sumber daya anggaran terkait alokasi anggaran dalam memperkuat PUG
5. Data pilah
6. Alat Analisis
7. Partisipasi masyarakat

Untuk Tahun 2023, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Sulawesi Selatan meraih kategori Nindya. Adapun capaian APE Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari

pencapaian kategori APE di 24 kab/kota yang telah memenuhi 7 prasyarat PUG. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2021 dan 2023

Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kab/Kota	Kategori APE	
		2021	2023
1.	Makassar	Utama	Nindya
2.	Maros	Utama	Madya
3.	Bone	Utama	Madya
4.	Sinjai	Utama	Madya
5.	Luwu Timur	Utama	Madya
6.	Pangkep	Madya	Madya
7.	Bulukumba	Utama	Pratama
8.	Parepare	Utama	Pratama
9.	Bantaeng	Madya	Pratama
10.	Wajo	Madya	Pratama
11.	Soppeng	Madya	Pratama
12.	Luwu	Madya	Pratama
13.	Luwu Utara	Madya	Pratama
14.	Palopo	Madya	Pratama
15.	Enrekang	Pratama	Pratama
16.	Barru	-	Pratama
17.	Selayar	Pratama	Pratama
18.	Sidrap	Pratama	-
19.	Jeneponto	Madya	-
20.	Takalar	Madya	-
21.	Gowa	Madya	-
22.	Pinrang	-	-
23.	Toraja	-	-
24.	Toraja Utara	-	-
	Provinsi Sulawesi Selatan	Madya	Nindya

Sumber Kementerian PPPA 2023

**Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Tahun	Kategori
1.	2013-2016	Utama
2.	2018-2021	Utama
3.	2021	Mentor
4.	2023	Nindya

Sumber Kementerian PPPA 2023

Secara umum, permasalahan yang dihadapi adalah keterlibatan partisipasi perempuan di tingkat parlemen yang masih tergolong rendah yaitu sebesar 26%. Kondisi status pekerjaan perempuan yang cenderung lebih banyak bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar sehingga sumbangsih pendapatan perempuan masih rendah. Keterbatasan anggaran pada Tahun 2023 maka Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Sistem Informasi Gender dan Anak Tingkat Kabupaten Kota Tahun 2023 hanya dilakukan di beberapa kab/kota saja yang melaksanakan pelatihan bagi petugas di daerah masing-masing dan Kab/kota yang melakukan koordinasi ke Provinsi.

Komponen lain yang turut berkontribusi pada peningkatan IDG di Sulawesi Selatan adalah Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif di lembaga swasta Proporsi perempuan yg berada di posisi manajerial, tingkat proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di Sulawesi Selatan mengalami pelambatan di 2020 sampai dengan tahun 2021, hal ini disebabkan adanya kasus covid'19 yang berdampak pada pengurangan pekerja bagi perempuan. Demikian pula pada komposit pembentuk IDG proporsi Sumbangan Pendapatan Perempuan di Sulawesi Selatan masih rendah dibanding dengan Nasional, dimana sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga, baru mampu mencapai 28,6% pada tahun 2018 bahkan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut terjadi dikarenakan kesenjangan di bidang ekonomi masih cukup tinggi, perempuan di Sulawesi Selatan masih banyak bekerja disektor non formal dan tidak dibayar.

Faktor penghambat disebabkan oleh salah satu dimensi pembentuk nilai IDG yang tergolong masih rendah. Nilai IDG dibentuk berdasarkan 3 dimensi yaitu

- 1) Keterlibatan perempuan di parlemen, dimana Tahun 2021 hanya sebesar 25,88% belum memenuhi kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen, selanjutnya Tahun 2022 kembali menguat ke 27,06% karena terdapat tambahan legislator perempuan. Untuk Tahun 2023, kondisinya masih sama dengan tahun sebelumnya karena jumlah anggota legislator masih dalam periode yang sama.
- 2) Perempuan sebagai pengambil keputusan rentang waktu Tahun 2019-2023* cenderung fluktuatif namun angkanya sudah mencapai di atas 50% yang berarti kondisi tersebut menunjukkan kondisi kesetaraan gender,
- 3) Sumbangan pendapatan perempuan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 kondisi sumbangan pendapatan perempuan masih berada di sekitar 30% yang berarti masih terdapat kondisi pada status pekerjaan perempuan yang bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar.

Upaya-upaya dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen seiring adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penambahan 12 indikator kritis dalam rangka memaksimalkan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya di daerah.
2. Mendorong proporsi keterlibatan perempuan di parlemen, yakni sampai dengan Tahun 2021 persentase perempuan di parlemen di Sulawesi Selatan sebesar 28% sedangkan nasional baru mencapai 21%.
3. Mendorong peningkatan kualitas peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi, sampai saat ini secara kuantitas telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan, namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki.
4. Mendorong persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif di lembaga swasta Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.
5. Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan untuk turut serta meningkatkan sumbangsih perempuan di sektor perekonomian.
6. Memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi perempuan di tingkat parlemen yang masih tergolong rendah sebesar 27,06%* (2022) dengan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas politik bagi perempuan. Melakukan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan dalam mendukung pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan sumbangsih pendapatan perempuan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp.1.761.115.224 dengan realisasi sebesar Rp.1.662.278.066 atau 94,39%. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 99,88%, berarti tingkat efisiensi pada sasaran ini adalah sebesar 4,75%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.050.847.200	989.961.958	94,21
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	710.268.024	672.316.108	94,66
	Jumlah	1.761.115.224	1.662.278.066	94,39

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain terus

mendorong proporsi keterlibatan perempuan di parlemen, meningkatkan kualitas peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Sasaran 9

Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Angka Kriminalitas dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Angka Kriminalitas dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Kriminalitas	24.438	23.455	108,38

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 9 realisasi capaian kinerja indikator Angka Kriminalitas yaitu 108,38% sehingga capaian kinerja melampaui target dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi untuk indikator kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kriminalitas	-	15.158	15.210	25.357	23.455

Realisasi Indikator Kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2023 dengan angka 23.455 kasus jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2020 Angka Kriminalitas sebanyak 15.158 kasus, Tahun 2021 meningkat menjadi 15.210 kasus dan pada Tahun 2022 terjadi lonjakan kasus sebesar 25.357 kasus.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Angka Kriminalitas	23.455	24.709	-

Realisasi indikator kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2023 sebesar 23.455 kasus menunjukkan hal yang positif jika dibanding target jangka menengah yaitu 24.709 kasus.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Angka kriminalitas di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 turun jika dibandingkan dengan Tahun 2022, Kasus Tindak Pidana Umum yang dapat diungkap di Tahun 2022 sebanyak 25.357 perkara dengan penyelesaian sebanyak 14.935 perkara sedangkan Tahun 2023 yang dapat diungkap sebanyak 23.455 perkara dengan penyelesaian 18.241 perkara. Terjadi penurunan sebanyak 1.902 perkara atau sebanyak -7,5% sedangkan penyelesaian perkara mengalami peningkatan sebanyak 7.116 perkara atau sebanyak 22,13%". Kasus korupsi yang diungkap di Tahun 2022 sebanyak 64

perkara diselesaikan 59 perkara dan pada Tahun 2023 kasus korupsi diungkap 50 perkara dengan penyelesaian 46 perkara. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan uang negara pada Tahun 2022 sebesar 130 Milyar Rupiah lebih dan pada Tahun 2023 sebesar 43 Milyar lebih. Dalam penanganan narkoba, yang dapat diungkap di Tahun 2022 sebanyak 2.028 perkara dengan diselesaikan 2.223 perkara, sedangkan pada Tahun 2023 yang dapat diungkap sebanyak 2.217 perkara dan diselesaikan 1.879 perkara. Barang bukti yang berhasil diamankan pada Tahun 2023 yaitu ganja 21 Kg, shabu 98 kg, obat daftar G 183.109 butir, ekstasi 20.145 butir dan sintetis 2 Kg.

Menurunnya angka kriminalitas diperoleh dengan mengoptimalkan forum kemitraan yang telah dibentuk seperti, Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM/KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS), Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN), Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, serta koordinasi dengan jaringan yang melakukan cipta kondisi dan deteksi dini di lingkungan Masyarakat.

Data statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp.70.034.352.619 dengan realisasi sebesar Rp.61.861.254.792 atau 88,33%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 108,38%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 22,69%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.787.033.050	4.525.375.206	94,53
2	Program Kesejahteraan Rakyat	60.741.535.169	53.195.988.898	87,58
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.127.971.100	2.837.374.011	90,71

4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1.377.813.300	1.302.516.677	94,54
Jumlah		70.034.352.619	61.861.254.792	88,33

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2023 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran strategis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menciptakan rasa aman bagi masyarakat sehingga dapat membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi dengan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah 2 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
3	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Sasaran 10
Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	78.536.078	79.961.555	103,37

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 10 dengan indikator Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mengalami tren kenaikan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 103,37 sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi untuk indikator kinerja Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	82.027.871	76.913.143	77.452.562	79.149.921	79.961.555

Realisasi indikator kinerja Produktivitas Total Daerah periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di atas, dimana pada Tahun 2019 diperoleh nilai yang cukup tinggi yaitu Rp.82.027.871 jika dibandingkan Tahun 2020 terjadi penurunan di angka Rp.76.913.143, selanjutnya Tahun 2021 mulai terjadi peningkatan yaitu Rp.77.452.562, demikian halnya Tahun 2022 berada pada angka Rp.79.149.921 dan meningkat lagi di Tahun 2023 yaitu Rp.79.961.555.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah dan standar nasional.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) Tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	79.961.555	93.325.387	-

Perbandingan realisasi untuk indikator kinerja Produktivitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja) Tahun 2023 dengan target jangka menengah dimana realisasi indikator kinerja Produktivitas Total Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.79.961.555 masih jauh di bawah target jangka menengah yaitu Rp.93.325.837.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan Produktivitas Total Daerah di Sulawesi Selatan, tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan luas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.
2. Pengembangan infrastruktur untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa, meningkatkan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur yang terbangun adalah, transportasi jalan, pelabuhan, bandar udara, infrastruktur energi termasuk pembangkit listrik, jaringan listrik,
3. Menciptakan iklim investasi, adanya kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung investasi seperti kemudahan perizinan dan insentif fiskal yang dapat menarik investor.

4. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.
5. Mengembangkan infrastruktur yang mamadai
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
7. Meningkatkan akses ke teknologi dan informasi

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 8 Program sebesar Rp.70.187.663.771 dengan realisasi sebesar Rp.35.902.543.789 atau 51,15%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,37%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 52,22%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
1	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.583.807.520	2.033.618.888	78,71
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	37,410,867,789	25,347,693,829	67,75
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5,314,667,527	1,861,833,577	35,03
4	Program Pengelolaan Hutan	32.440.109.627	1.909.727.670	5,887
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	32.440.109.627	29.235.560.234	90,12
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,852,653,600	1,052,205,814.50	56,79
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.694.660.850	2.694.660.850	100
8	Program Pengembangan Ekspor	28.976.147	28.976.147	100
	Jumlah	70.187.663.771	35.902.543.789	51,15

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2022 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Secara umum terkait program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran strategis ini antara lain adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan Produktivitas Total Daerah di Sulawesi Selatan, tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan luas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing, mengembangkan infrastruktur yang mamadai, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan akses ke teknologi dan informasi, melalui program dan kegiatan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

No	Program	Kegiatan
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
4	Program Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
8	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam Provinsi

SASARAN 11

Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Potensi Penurunan Emisi GRK dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Potensi Penurunan Emisi GRK dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1,347	1,66	123

Capaian indikator Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2023 sebesar 1,66 juta ton CO₂eq atau sebesar 123% dari target yang ditetapkan sebesar 1,347 juta ton CO₂eq, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya Indikator Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO₂ Eq) cenderung meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 5 (lima) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	0,89	0,96	1,13	1,36	1,66

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Realisasi capaian Tahun 2019 (0,89) meningkat di Tahun 2020 (0,96) demikian halnya di Tahun 2021 (1,13) dan Tahun 2022 (1,36) selanjutnya di Tahun 2023 meningkat menjadi 1,66.

c. Perbandingan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target jangka menengah Indikator Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO₂ Eq) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ₂ Eq)	1,66	2,3	-

Realisasi capaian target Indikator Indikator Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO₂ Eq) Tahun 2023 dengan nilai 1,66 masih belum dapat mencapai target jangka menengah (2,3).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Tingkat keberhasilan pencapaian target Potensi Penurunan Emisi GRK antara lain disebabkan oleh tingginya dukungan pemerintah kabupaten/kota, akademisi dan parapihak lainnya dalam pelaksanaan program/kegiatan dan aksi mitigasi yang berpotensi menurunkan emisi GRK baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam mengarusutamakan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam pembangunan daerah, berimplikasi pada meningkatnya penganggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung kebijakan nasional Pembangunan Rendah Karbon (PRK) diwujudkan dengan penetapan PERGUB Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan tersebut merupakan wujud dari inisiatif penandatanganan komitmen 24 Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,5 Juta Ton CO₂eq hingga Tahun 2030 dan juga menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia.

Berdasarkan hasil kaji ulang Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD- GRK), target penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 3,5 juta ton CO₂ eq atau sebesar 5,6 persen terhadap nilai *Business as usual* (BAU). Berdasarkan data capaian indikator kinerja, potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Tahun 2019 sampai Tahun 2021 dapat tercapai. Target penurunan emisi Tahun 2022 adalah sebesar 1,198 juta ton CO₂ eq dengan realisasi penurunan emisi GRK sebesar 1,36 juta ton CO₂ eq. Tingkat capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada Tahun 2022 adalah 113,52% dengan jumlah kegiatan/aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan sebanyak 704 kegiatan.

Target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat tercapai setiap tahunnya tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2020 Pemerintah Kabupaten/Kota secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang dianggarkan melalui APBD masing-masing. Kegiatan yang telah dilaporkan melalui aplikasi AKSARA adalah yg dilaksanakan sejak Tahun 2018. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setiap tahunnya untuk semua sektor, yaitu; sektor hutan dan lahan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi, sektor energi dan sektor blue carbon. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang aktif dan tepat waktu melaporkan aksi mitigasi ke aplikasi AKSARA, sehingga pada tahun 2021 berhasil menjadi salah satu provinsi terbaik pelaporan AKSARA selama 1 dekade (2010-2020). Pencapaian tertinggi diperoleh pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, dimana Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Penghargaan Khusus Bidang Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau.

Dalam pelaksanaan pencapaian target, terdapat banyak permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Beberapa kegiatan yang tidak berjalan optimal antara lain operasional BRT Mamminasata, pemanfaatan methane pada sektor persampahan/limbah;
2. Pelaporan penurunan emisi GRK belum melibatkan Kabupaten/Kota secara maksimal dalam inventarisasi aksi mitigasi di masing-masing sektor, sehingga data pada tingkat Kabupaten/Kota belum terdokumentasi secara baik;

3. Perangkat Daerah terkait belum bisa melakukan identifikasi jenis kegiatan yang masuk dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi, RAD Penurunan Emisi GRK belum diintegrasikan ke dalam Renstra Perangkat Daerah terkait;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
5. Identifikasi data inventarisasi pengelolaan limbah sangat sulit untuk didapatkan karena pendataan pelaksanaan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah di Kab/Kota belum baik,
6. Pengumpulan data di Kab/Kota secara update belum tersedia seperti data laporan Jakstrada Pengelolaan Sampah, keterbatasan anggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa upaya dan inovasi yang dilakukan pemerintah provinsi dalam pencapaian target indikator potensi penurunan emisi GRK antara lain:

1. peningkatan kapasitas kelompok kerja pembangunan rendah karbon yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah terkait, sektor lahan/hutan, pertanian, energi, transportasi dan persampahan/limbah serta pesisir/laut
2. Pelibatan pemerintah kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas kepada Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota.
3. Pelibatan akademisi, NGO dan mitra pembangunan serta parapihak lainnya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon di Sulawesi Selatan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 10 Program sebesar Rp.16.970.485.637 dengan realisasi sebesar Rp.11.253.345.094 atau 66,31%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 123%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 56,65%.

Tingkat Realisasi Penggunaan Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penanggulangan Bencana	8.424.202.036	6.847.032.707	81,28
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.879.112.800	1.277.085.490	67,96
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	175.269.000	-	0
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	672.074.470	261.198.377	38,86
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	472.567.800	435.459.038	92,15
6	Program Pengeloaan Energi Terbarukan	229.997.000	9.540.000	4,148
7	Perogram Pengelolaan kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil	13,535,671,100	8,838,269,191	65,3
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3,627,801,000	2,693,570,950	74,25
9	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.922.727.831	2.245.561.143	45,62

10	Program Pengelolaan Persampahan	194.534.700	177.468.339	91,23
	Jumlah	16.970.485.637	11.253.345.094	66,31

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2023 Unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target Indikator Potensi Penurunan Emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kontribusi seluruh sektor, yaitu; lahan/hutan, pertanian, energy, transportasi, persampahan/limbah dan pesisir/laut. Pencapaian target potensi penurunan emisi GRK Tahun 2023 sebagian besar bersumber dari program/kegiatan sektor pertanian, transportasi dan hutan/lahan. Sektor persampahan/limbah, energi dan pesisir/laut walau belum berkontribusi banyak, tetapi peluang pelaksanaan program kegiatan yang rendah karbon masih sangat besar.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini tergambar dalam tabel berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Penanggulangan Bencana	1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 2 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
7	Perogram Pengelolaan kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

No	Program	Kegiatan
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
10	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

2.3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang semakin sejahtera, Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 9.673.313.309.003,01 dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.323.264.113.294,45 atau 96,38%, sebagai catatan angka realisasi adalah angka sebelum audit oleh BPK RI. Selengkapnya dapat dilihat dari uraian berikut ini:

1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir Tahun 2023, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp.10.156.734.331.527,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.529.048.625.670,16 mencapai 93,82%. Dari Jumlah realisasi pendapatan daerah tersebut, masing-masing kelompok pendapatan daerah memberikan kontribusi:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.5.183.909.557.070,16 atau sebesar 90,13% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.5.751.863.972.794,00
- b. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 Rp.4.321.775.209.053,00 atau sebesar 98,59% dari target yakni Rp.4.260.935.957.241,00
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 Rp.11.622.405.680,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.730.367.359,00 atau 109,53%.

2. Aspek Belanja Daerah

Tahun 2023 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp.9.484.932.654.738,40 atau sebesar 93,54% dari rencana anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.10.139.793.942.365,00

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Dasar hukum pelaksanaannya :

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA. 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA. 2020.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi

Satuan Kerja yang melaksanakan pemberian anggaran Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas Pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan merupakan urusan pemerintahan diluar enam urusan yang bersifat mutlak, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang dapat mendukung program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam bentuk Tugas Pembantuan. Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 bersumber dari 7 (tujuh) Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Perdagangan sebesar Rp. 278.652.198.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 273.357.798.223,- atau sebesar 98,10%.

Adapun OPD Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 8 (delapan) OPD, yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Dinas Perdagangan;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Koperasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Tugas Pembantuan yang dikerjakan oleh masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari 7 (tujuh) Kementerian dan dapat diuraikan sebagai berikut:

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

1) Kementerian Pertanian

Untuk Kementerian Pertanian Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan ada 2 yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

a) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri didukung dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Rp. 4.713.778.000,- realisasi Rp.4.682.198.317,-
 - b. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.3.185.000.000,- realisasi Rp.3.172.218.300,-
 - c. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Rp. 1.054.000.000,- realisasi Rp.1.031.490.566,-

- d. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Rp. 1.969.280.000,- realisasi Rp.1.956.245.092,-
 - e. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Rp.7.271.580.000,- realisasi Rp. 7.193.163.708,-
 - f. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Rp.913.103.000,- realisasi Rp. 832.002.411,-
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan Rp. 5.017.700.000,- realisasi Rp.4.814.201.000,-
 - b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan Rp.10.472.500.000,- realisasi Rp.10.059.594.996,-
 - c. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Rp.18.236.300.000,- realisasi Rp.17.768.126.750,-
 - d. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp.980.000.000,- realisasi Rp.957.221.000,-
 - e. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp.1.909.500.000,- realisasi Rp.1.895.095.900,-
 - f. Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Rp.2.377.565.000,- realisasi Rp.2.347.434.478,-
 - g. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Rp.460.000.000,- realisasi Rp.422.827.050,-
 - h. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Rp.1.222.129.000,- realisasi Rp.1.191.263.489,-
 - i. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Rp.294.367.000,- realisasi Rp.267.395.916,-
 - j. Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Rp.4.229.400.000,- realisasi Rp.4.006.629.190,-
3. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan Rp.1.383.295.000,- realisasi Rp.1.382.645.355,-
 - b. Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp.320.000.000,- realisasi Rp.315.249.560,-
 - c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan Rp.311.980.000,- realisasi Rp.310.416.500,-

- d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp.1.768.600.000,- realisasi Rp.1.718.765.844,-
- e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp.644.900.000,- realisasi Rp.643.686.364,-

b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan :

- 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Rp.435.000.000,- realisasi Rp. 403.586.195,-
- 2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp.705.390.000,- realisasi Rp.673.702.868,-
 - b. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rp.21.517.975.000,- realisasi Rp.20.310.925.226,-
 - c. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Rp.14.160.245.000,- realisasi Rp.13.500.961.800,-
 - d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp.525.500.000,- realisasi Rp.465.824.973,-
 - e. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.997.200,-
- 3. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Rp.383.556.000,- realisasi Rp.380.549.000,-
 - b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp.380.000.000,- realisasi Rp.377.092.000,-

2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

OPD yang melaksanakan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Program yang dilaksanakan :

- 1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Rp.2.909.211.000,- realisasi Rp.2.785.780.773,-

2. Program Dukungan Manajemen

- Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Rp.76.320.000,- realisasi Rp.74.057.600,-

3) Kementerian Kelautan dan Perikanan

OPD yang melaksanakan yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Bantuan Peralatan/Sarana
Rp.1.050.000.000,- realisasi Rp.101.608.900,-
- b. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Rp.13.186.000,- realisasi Rp.2.186.000,-
- c. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Rp.99.400.000,- realisasi Rp.98.880.000,-
- d. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Rp.16.741.000,- realisasi Rp.16.740.800,-

2. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan :

- Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp.17.700.000,-
realisasi Rp.17.000.000,-

4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

OPD yang melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program :

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air

- a. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Rp.52.229.239.000,- realisasi Rp.51.974.998.100,-

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air Rp.1.164.466.000,-
realisasi Rp.951.558.074,-
 - b. Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Rp.746.298.000,-
realisasi Rp.737.369.371,-
3. Program Infrastruktur Konektivitas
- a. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Rp.8.350.618.000,- realisasi Rp.8.350.183.534,-
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
Rp.49.340.859.000,- realisasi Rp.49.340.856.100,-

5) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

OPD yang melaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dengan Program :

1. Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Rp.87.500.00,-
realisasi Rp.87.492.400,-
 - b. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Rp.87.500.000,- realisasi Rp.86.323.900,-
 - c. Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Rp.600.000.000,-
realisasi Rp.595.412.500,-
 - d. Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)
Rp.500.000.000,- realisasi Rp.498.430.000,-
 - e. Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.199.703.000,-
2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan Rp.110.000.000,-
realisasi Rp.106.815.000,-

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENTERIAN PERTANIAN RI/DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Sulawesi Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	4.713.778.000,00	4.682.198.317,00	99,33	100,00	100,00
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	3.185.000.000,00	3.172.218.300,00	99,60	100,00	100,00
				Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.054.000.000,00	1.031.490.566,00	97,86	99,36

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.969.280.000,00	1.956.245.092,00	99,34	100,00	100,00
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	7.271.580.000,00	7.193.163.708,00	98,92	100,00	100,00
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	913.103.000,00	832.002.411,00	91,12	92,62	92,62
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	5.017.700.000,00	4.814.201.000,00	95,94	97,44	97,44

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	10.472.500.000,00	10.059.594.996,00	96,06	97,56	97,56
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	18.236.300.000,00	17.768.126.750,00	97,43	98,93	98,93
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	980.000.000,00	957.221.000,00	97,68	99,18	99,18
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.909.500.000,00	1.895.095.900,00	99,25	100,00	100,00
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2.377.565.000,00	2.347.434.478,00	98,73	100,00	100,00

				PROVINSI SULAWESI SELATAN						
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	460.000.000,00	422.827.050,00	91,92	93,42	93,42
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.222.129.000,00	1.191.263.489,00	97,47	98,97	98,97
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	294.367.000,00	267.395.916,00	90,84	92,34	92,34
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	4.229.400.000,00	4.006.629.190,00	94,73	96,23	96,23

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.383.295.000,00	1.382.645.355,00	99,95	100,00	100,00
		Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	320.000.000,00	315.249.560,00	98,52	100,00	100,00
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	311.980.000,00	310.416.500,00	99,50	100,00	100,00
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.768.600.000,00	1.718.765.844,00	97,18	98,68	98,68
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	644.900.000,00	643.686.364,00	99,81	100,00	100,00

				dan Sarana Pertanian		PROVINSI SULAWESI SELATAN					
KEMENTERIAN PERTANIAN							68.734.977.000,00	66.967.871.786,00	97,43	98,93	98,93
2	KEMENTERIAN PERTANIAN RI/DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Sulawesi Selatan	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	435.000.000,00	403.586.195,00	92,78	94,28	94,28
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	705.390.000,00	673.702.868,00	95,51	97,01	97,01
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	21.517.975.000,00	20.310.925.226,00	94,39	95,89	95,89
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	14.160.245.000,00	13.500.961.800,00	95,34	96,84	96,84

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	525.500.000,00	465.824.973,00	88,64	90,14	90,14
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	50.000.000,00	49.997.200,00	99,99	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	383.556.000,00	380.549.000,00	99,22	100,72	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	380.000.000,00	377.092.000,00	99,23	100,00	100,00
KEMENTERIAN PERTANIAN							38.157.666.000,00	36.162.639.262,00	94,77	96,27	96,27
TOTAL							106.892.643.000,00	103.130.511.048,00	96,48	97,98	97,98

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI/DIREKTORAT BINA MARGA DAN PUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Noomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Sulawesi Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	52.229.239.000,00	51.974.998.100,00	99,51	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.164.466.000,00	951.558.074,00	81,72	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga		DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	746.298.000,00	737.369.371,00	98,80	100,00	100,00
			Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	8.350.618.000,00	8.350.183.534,00	99,99	100,00	100,00
			Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	49.340.859.000,00	49.340.856.100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL							111.831.480.000,00	111.354.965.179,00	99,57	100,00	100,00

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

1	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Sulawesi Selatan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN	87.500.000,00	87.492.400,00	99,99	100,00	100,00
			Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN	87.500.000,00	86.323.900,00	98,66	100,00	100,00
			Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN	600.000.000,00	595.412.500,00	99,24	100,00	100,00
			Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN	500.000.000,00	498.430.000,00	99,69	100,00	100,00
			Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN	200.000.000,00	199.703.000,00	99,85	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN	110.000.000,00	106.815.000,00	97,10	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

TOTAL	1.585.000.000,00	1.574.176.800,00	99,32	100,00	100,00
--------------	-------------------------	-------------------------	--------------	---------------	---------------

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Sulawesi Selatan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.909.211.000,00	2.785.780.773,00	95,76	97,26	97,26
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	76.320.000,00	74.057.600,00	97,04	98,54	98,54
TOTAL							2.985.531.000,00	2.859.838.373,00	95,79	97,29	97,29

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.2 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

1. Kementerian Pertanian

Untuk Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh 5 (lima) Kabupaten yang melaksanakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan yaitu :

- Kabupaten Enrekang
 - a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp.485.000.000,- realisasi Rp.483.051.500,-
 - b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp.500.000.000,- realisasi Rp.498.981.200,-
 - c. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp.95.000.000,- realisasi Rp.94.058.220,-
- Kabupaten Wajo
 - a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Rp.1.965.750.000,- realisasi Rp.1.919.270.000,-
 - Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Rp.46.080.000,- realisasi Rp.45.540.000,-
 - Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Rp.56.653.000,- realisasi Rp.56.653.000,-
 - b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Rp.322.367.000,- realisasi Rp.322.367.000,-
- Kabupaten Luwu Timur
 - a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Rp.286.000.000,- realiasasi Rp.284.671.060,-

- Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Rp.880.000,- realisasi Rp.880.000,-

- b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Rp.402.960.000,- realisasi Rp.401.792.757,-

- Kabupaten Bantaeng
 - a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp.395.000.000,- realisasi Rp.394.754.000,-
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp.420.000.000,- realisasi Rp.418.510.000,-
 - b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp.95.000.000,- realisasi Rp.94.307.735,-

- Kabupaten Sinjai
 - a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp.570.000.000,- realisasi Rp.568.787.500,-
 - b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp.95.000.000,- realisasi Rp.94.832.214,-

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Kabupaten Jeneponto
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan Rp.2.180.365.000,- realisasi Rp.2.015.522.858,-

- Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Program Pengelolaan dan Kelautan
 - Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan Rp.3.462.420.000,- realisasi Rp.3.430.557.500,-

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Kabupaten Takalar
 - a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.1.747.500.000,- dengan realisasi Rp.1.746.079.000,-
 - b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.22.500.000,- realisasi Rp.22.500.000,-

- Kabupaten Wajo
 - a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.1.857.029.000,- dengan realisasi Rp.1.856.986.500,-
 - b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.76.120.000,- realisasi Rp.76.108.000,-

- Kabupaten Luwu Utara
 - a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.866.600.000,- realisasi Rp.865.457.253,-
 - b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.72.760.000,- realisasi Rp.67.240.000,-

- Kabupaten Luwu Timur
 - a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.3.856.265.000,- dengan realisasi Rp.3.834.777.197,-

- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.416.000.000,- realisasi Rp.412.931.000,-
- b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.83.210.000,- realisasi Rp.82.407.840,-
- Kabupaten Sidrap
 - a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.2.734.742.000,- dengan realisasi Rp.2.721.499.866,-
 - b. Program Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp.74.540.000,- realisasi Rp.74.538.000,-

4. Kementerian Perdagangan

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.969.725.421,-
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.941.698.000,-
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.913.417.868,-
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
Program Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.912.438.805,-

- Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.897.481.436,-
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.940.451.958,-
- Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Program Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Rp.3.000.000.000,- realisasi Rp.2.955.081.135,-

5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM
Rp.11.171.803.000,- realisasi Rp.11.022.951.000,-

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Provinsi (Terlampir)

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- Terjadinya kesalahan-kesalahan pada akun yang ada di Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
- Selalu dilakukan realokasi anggaran dan kegiatan
- Seringnya dilakukan revisi baik dari pusat maupun dari provinsi (Satker pelaksana kegiatan).

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Beberapa Kegiatan tidak terurai secara detail, tidak sesuai dengan peruntukan akunnya, dan ada kegiatan yang tidak semua diakomodir anggaran.
- Kegiatan pembangunan permukiman (PTB) yang dibangun dilokasi monitoring terhambat akibat terpengasnya anggaran monitoring pembangunan permukiman transmigrasi baru.
- Lambatnya pembangunan jalan dan Talud dilokasi Tanakeke Kab. Takalar.
- Kurangnya SDM khususnya kualitas SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada DIPA Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
- Data dari KIMA, ada beberapa perusahaan yang masih terdaftar tetapi saat pengawas melakukan kunjungan ternyata perusahaan tersebut tidak diketahui apakah sudah tutup atau pindah tempat/alamat.
- Belum semua perusahaan memiliki ruang ramah ibu dan anak seperti belum tersedianya ruang laktasi.
- Kurangnya pengetahuan/pemahaman pengusaha terhadap UU Ketenagakerjaan.
- Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan UMP/UMK.
- Belum semua perusahaan mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Kurangnya SDM Penyidik Ketenagakerjaan.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- Masih terbatasnya anggaran untuk melaksanakan perbaikan jaringan irigasi sehingga tidak semua kerusakan bisa dilakukan perbaikan, hanya yang paling mendesak bisa ditangani.
- Keterbatasan personil yang menangani OP khususnya pegawai kontrak, terutama dengan adanya petugas OP (PNS) yang sudah memasuki masa purna bakti yang berakibat pada kemampuan Petugas OP dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- Tidak adanya anggaran untuk pengadaan fasilitas OP.
- Keterlambatan pelaksanaan beberapa kegiatan pemeliharaan dikarenakan adanya beberapa permasalahan sosial di lapangan, kegiatan pemeliharaan berkala terkendala penggunaan air sehingga pelaksanaannya mulai dilaksanakan setelah MT-2 sekitar bulan agustus-september.
- Pelaksanaan pekerjaan kebanyakan terserap pada rutin kondisi
- Kesulitan dalam mencari tenaga kerja lokal pada pelaksanaan kegiatan rutin jembatan.
- Belum terbayarnya honor staf akibat keterlambatan penertiban SK dari Dinas PU Prov. Sulsel.

- Peralatan alat pancang terlambat tiba dilokasi.
- Alat pancang tidak maksimal dalam pekerjaan rahab jembatan.
- Kegiatan penanganan Drainase sementara dalam proses pencairan tenaga kerja.
- Pengadaan CPHMA sementara dalam proses.

4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Peternak menganggap ternak yang di *eartag* tidak sesuai dengan syarat untuk di Qurban.
- Penginputan data ternak yang telah di *eartag* sering mengalami masalah pada aplikasi IDENTIK PKH.
- Pelaksanaan kegiatan sangat singkat sehingga realisasi tidak mencapai 100%.
- Sosialisasi kegiatan Pendataan dan Penandaan Ternak di Kab./Kota masih kurang.
- Sistem pemeliharaan secara intensif menyebabkan ternak susah untuk dikumpulkan.
- Masih ditemukan dilapangan terjadi *accident* pada ternak pada saat penandaan (telinga sobek) sehingga dibutuhkan obat-obatan seperti alcohol, Gusanex dan lain-lain.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- Pada Penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dilakukan secermat mungkin agar tidak ditemukan lagi kesalahan pada akun di POK
- Revisi dilakukan pada kegiatan yang betul-betul untuk efektifitas dan efesiensi program, kegiatan dan anggaran.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Melakukan koordinasi dengan bidang teknis dan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program PKP2trans dan meningkatkan koordinasi dengan pusat, dinas ketransmigrasian kab/kota serta instansi yang terkait dalam pelaksanaan program transmigrasi .
- Melakukan koordinasi ke pusat terkait anggaran yang akan dipotong, sehingga kegiatan yang penting tetap dipertahankan anggarannya.
- Membuat perencanaan teknis sebelum pembangunan fisik, dimana perencanaan sebaiknya dibuat n-1 sehingga pembangunan fisik tidak terkendala menunggu selesainya perencanaan teknis. Perencanaan yang baik

dalam pelaksanaan program sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan tepat waktu.

- Peningkatan kualitas SDM melalui diklat struktural maupun diklat fungsional.
- KIMA harus membuat data base tentang perusahaan dan harus selalu mengupdate data base tersebut, sehingga apabila sebuah perusahaan pindah alamat maupun tutup, datanya tetap ada.
- Menghimbau semua perusahaan untuk menyediakan ruang ramah ibu/anak.
- Perlu sosialisasi UU Ketenagakerjaan
- Menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan aturan sesuai UU Ketenagakerjaan.
- Menghimbau semua perusahaan untuk segera mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
- Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PNS yang ingin menjadi PPNS.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- Memberikan alokasi dana sesuai hasil penelusuran jaringan jaringan dan survey AKNOP yang telah dilakukan serta meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Memaksimalkan kebutuhan petugas OP dan melakukan pendapatan secara berkala terhadap kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan tenaga OP.
- Pembinaan terhadap petugas OP dilapangan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan baik melalui pelatihan dikelas maupun on job training.
- Petugas OP untuk melaporkan kebutuhan Fasilitas OP (peralatan kantor, mesin senso/pemotong rumput, dll) pada Laporan AKNOP untuk diteruskan ke BBWS PJ Selaku pihak yang bisa mangadakan fasilitas OP.
- Meningkatkan koordinasi antara BBWS PJ, Dinas SDA, CK-TR Prov. Sulsel dan Dinas PU/SDA Kabupaten /Kota dalam hal perencanaan dan penentuan lokasi serta jadwal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan agar bisa selesai tepat waktu dan tepat manfaat.
- Segera melakukan penanganan pekerjaan holding.
- Mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.
- Mengkonfirmasi terkait penertiban SK
- Mendesak pelaksana untuk menyediakan alat pancang lain
- Menambah alat berat berupa excavator untuk mendukung pelaksanaan percepatan pekerjaan
- Mempercepat proses pencairan tenaga kerja
- Segera menyelesaikan proses pengadaan CPHMA

4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Perlu adanya penyediaan obat-obatan dan vitamin sebagai support bagi pemilik ternak guna untuk mempermudah pelaksanaan pendataan dan penandaan ternak.
- Mendorong kepada Pemerintah khususnya MUI dan mengeluarkan Fatwa khususnya penandaan ternak yang tergolong untuk hewan Qurban.
- Aplikasi PKH diharapkan lebih simple dan mengurangi kendala aplikasi error.
- Diharapkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti KEPMEN dan Kep. Dirjen agar Pemerintah Daerah Kab./Kota bisa menindaklanjuti Hasil Keputusan Gubernur dan Bupati.

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENTERIAN PERTANIAN RI/DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sulawesi Selatan	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG	485.000.000,00	483.051.500,00	99,60	100,00	100,00
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	1.965.750.000,00	1.919.270.000,00	97,64	99,14	99,14
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	46.080.000,00	45.540.000,00	98,83	100,00	100,00
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	56.653.000,00	56.653.000,00	100,00	100,00	100,00
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	286.000.000,00	284.671.060,00	99,54	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00	100,00
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ENREKANG	500.000.000,00	498.981.200,00	99,80	100,00	100,00
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG	395.000.000,00	394.754.000,00	99,94	100,00	100,00
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG	420.000.000,00	418.510.000,00	99,65	100,00	100,00
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINJAI	570.000.000,00	568.787.500,00	99,79	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	95.000.000,00	94.058.220,00	99,01	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

				Ditjen Hortikultura		KABUPATEN ENREKANG					
			Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANTAENG	95.000.000,00	94.307.735,00	99,27	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	322.367.000,00	322.367.000,00	100,00	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	402.960.000,00	401.792.757,00	99,71	100,00	100,00
			Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINJAI	95.000.000,00	94.832.214,00	99,82	100,00	100,00
TOTAL							5.735.690.000,00	5.678.456.186,00	99,00	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Sulawesi Selatan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. JENEPONTO	2.180.365.000,00	2.015.522.858,00	92,44	93,94	93,94
			Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	3.462.420.000,00	3.430.557.500,00	99,08	100,00	100,00
TOTAL							5.642.785.000	5.446.080.358	96,51	98,01	98,01

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	11.171.803.000,00	11.022.951.000,00	98,67	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

		Melalui Dana Tugas Pembantuan									
TOTAL							11.171.803.000,00	11.022.951.000,00	98,67	100,00	100,00

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Takalar	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB. TAKALAR	1.747.500.000,00	1.746.079.000,00	99,92	100,00	100,00
		Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Takalar	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KAB. TAKALAR	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	100,00	100,00
			Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Wajo	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.857.029.000,00	1.856.986.500,00	100,00	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

		Perdesaan, dan Transmigrasi			KABUPATEN WAJO					
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Wajo	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO	76.120.000,00	76.108.000,00	99,98	100,00	100,00
		Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Luwu Utara	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA	866.600.000,00	865.457.253,00	99,87	100,00	100,00
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Luwu Utara	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA	72.760.000,00	67.240.000,00	92,41	93,91	93,91
		Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Luwu Timur	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR	3.856.265.000,00	3.834.777.197,00	99,44	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

		Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Luwu Timur	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR	416.000.000,00	412.931.000,00	99,26	100,00	100,00
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Luwu Timur	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR	83.210.000,00	82.407.840,00	99,04	100,00	100,00
		Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Sidrap	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidrap	2.734.742.000,00	2.721.499.866,00	99,52	100,00	100,00
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab. Sidrap	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidrap	74.540.000,00	74.538.000,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL						11.807.266.000,00	11.760.524.656,00	99,60	100,00	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

NO.	NAMA KL/ LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI/DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peraturan Menteri Dalam Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Kab. Gowa	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN GOWA	3.000.000.000,00	2.969.725.421,00	98,99	100,00	100,00
			Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Kab. Wajo	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo	3.000.000.000,00	2.941.698.000,00	98,06	99,56	100,00
			Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Kab. Maros	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAROS	3.000.000.000,00	2.913.417.868,00	97,11	98,61	100,00
			Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Kab. Luwu Timur	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur	3.000.000.000,00	2.912.438.805,00	97,08	98,58	100,00
			Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Kab. Bulukumba	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bulukumba	3.000.000.000,00	2.897.481.436,00	96,58	98,08	100,00

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

		Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Kab. Takalar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar	3.000.000.000,00	2.940.451.958,00	98,02	99,52	99,52
		Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	3.000.000.000,00	2.955.081.135,00	98,50	100,00	100,00
TOTAL						21.000.000.000,00	20.530.294.623,00	97,76	99,26	100,00

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta pengelolaan sarana prasarana Pendidikan. Dinas Pendidikan adalah satu bentuk organisasi pelayanan dibidang administrasi pendidikan khususnya terkait dengan upaya pengelolaan lembaga pendidikan sebagai rujukan yang mendukung upaya lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pelayanan pemerintah Dinas Pendidikan akan semakin giat untuk mendapat pandangan dan penilaian positif dari masyarakat. Selain itu, masyarakat menuntut lembaga negara harus dapat memberikan layanan yang *One Stop Services*, artinya seluruh kebutuhan pelayanan pendidikan dan pelayanan terkait siswa, guru dan tenaga kependidikan harus dapat dilayani oleh Dinas Pendidikan secara efektif dan efisien.

Untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan *hard skill* dan *soft skill* sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan standar nasional pendidikan, keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat.

Sedemikian pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun martabat bangsa, maka pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah dibidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai ketinggian tinggi. Perhatian tersebut ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran berarti serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam melaksanakan layanan dasar Dinas Pendidikan menetapkan target pencapaian SPM yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Untuk lebih jelasnya target pencapaian SPM sesuai RPJMD digambarkan pada table berikut:

**Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Menengah	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	100	Setiap Tahun

**Tabel 4.2
Target dan Pencapaian SPM Dinas Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RPJMD					Target SPM %
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Pendidikan Menengah	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	74.23	75.25	80.55	83.68	100	100
2.	Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	80	81	80.44	82.73	100	100

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tiap Tahun

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. (SPM)	%	100	86.20
2.	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	100	84.64

Tabel 4.4
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1.	Persentase Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	%	100	86.20
2.	Persentase Jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	%	100	84.64

Berdasarkan tabel perhitungan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2023 tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa :

1. Pencapaian tertinggi dari 2 jenis Pelayanan Dasar dibidang Pendidikan yaitu terdapat pada layanan Pendidikan menengah yaitu sebesar 86,20% dari target yang seharusnya 100% setiap tahun. Jumlah penduduk 16-18 tahun sebanyak 470.019 Orang dimana telah bersekolah SMA/SMK sederajat sebanyak 405.137 Orang sehingga didapat angka capaian sebesar 86.20 % penduduk bersekolah formal.
2. Capaian realisasi SPM untuk Pendidikan khusus yaitu 84.64% dari target seharusnya 100% setiap tahun. Jumlah penduduk 4-18 yang termasuk dalam penduduk dissabilitas sebanyak 4.524 Orang dimana telah bersekolah dipendidikan khusus sebanyak 3.829 sehingga didapat angka capaian sebesar 84,64% penduduk dissabilitas yang bersekolah formal.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1553/XI/Tahun 2023 Tentang Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebesar 3.117.910.013.772,- dengan rincian :

- Belanja Operasional Rp. 2.625.771.192.604.-
- Belanja Modal Rp. 492.138.821.168,-

Berdasarkan jumlah anggaran tersebut di atas telah terealisasi sebesar Rp. 2.751.881.242.165,- atau 88,26%, dengan rincian :

- Belanja Operasional sebesar Rp. 2.093.890.183.874,- atau 79.74 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 309.836.912.425,- atau 62.96%.

Berikut merupakan anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan :

**Tabel 4.5
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	APBD / Kegiatan			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	642.744.609.177	459.875.538.794	71,55
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	379.361.056.926	236.238.127.797	62,27
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	34.302.811.842	26.954.931.089	78,58
	APBN / DANA TRANSFER			
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SMA			
2	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK			
3	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SLB	8.363.760.000	6.884.726.594	83,09

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pendidikan yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM sebanyak 650 orang:

- a. Pejabat Struktural 60 Orang
- b. Pejabat Fungsional tertentu 405 Orang
- c. Pejabat Pelaksana 185 Orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Pemerataan Guru belum Sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya Pendidikan Menengah terutama sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik itu disekolah Pendidikan menengah maupun Pendidikan khusus.
- c. Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik formal di Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus terdapat masih banyaknya guru yang belum bersertifikat (Sertifikasi Guru).
- d. Standar Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional.
- e. Informasi tentang pendidikan kurang diketahui masyarakat disebabkan tidak ada Sistem Informasi administrasi berbasis IT.
- f. Perubahan anggaran/revocusing sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal.

Solusi

- a. Melalui Pemerataan dengan perpindahan dari sekolah yang kelebihan guru kesekolah yang kekurangan guru atau penambahan tenaga pendidik melalui penerimaan CPNS dan penerimaan melalui jalur P3K.
- b. Optimalisasi penggunaan Dana, baik yang bersumber APBD maupun yang bersumber dari APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- c. Memberikan semacam pelatihan atau kursus untuk menghadapi ujian sertifikasi guru.
- d. Melakukan Optimalisasi kegiatan PKG dan PKB.
- e. Pengadaan sistem informasi administrasi berbasis IT agar informasi tentang pendidikan muda dan cepat tersebar ke masyarakat melalui website.
- f. Usulan anggaran tidak ada pengurangan.

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi, Indikator yang harus dicapai dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah pelayanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan yang meliputi:

- Mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan,
- Mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan,
- Mendapatkan layanan gizi darurat,
- Mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat,
- Mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial,
- Mendapatkan penyuluhan kesehatan.

Tabel 4.6

Capaian Indikator Kinerja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Definisi operasional adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

$$\text{Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak} = \frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang}} \times 100\%$$

Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama

- Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa
Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, memerlukan dukungan logistic kesehatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

Dukungan Logistik Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana

No.	Jenis	Jumlah	Fungsi
1	Obat-obatan dan bahan Medis habis Pakai	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Pelayanan Kesehatan
2	Makanan Tambahan / Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA), dll	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penambah daya tahan tubuh
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana

Standar Jumlah dan kualitas personil/sumber daya Manusia, yaitu :

- Kebutuhan SDM Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di Pos kesehatan bagi penduduk terdampak yang dapat terbagi dalam beberapa shift yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan terdiri dari dokter umum, perawat dan bidan,
 - Kebutuhan SDM kesehatan untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan adalah sebagai berikut : dokter umum, perawat dan bidan,
 - Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi dan lain-lain,
 - Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan jiwa,
 - Apoteker dan/atau asisten apoteker,
 - Tenaga penyuluh/promosi Kesehatan,
 - Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko

pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.

Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut :

- ❖ KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota di satu provinsi yang meluas ke kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- ❖ KLB yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/ kota di satu provinsi berpotensi meluas ke kabupaten/kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- ❖ Pemerintah daerah kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah kabupaten/ kota terdampak.

Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi :

1. Penemuan kasus dan identifikasi faktor resiko melalui penyelidikan epidemiologi,
2. Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan,
3. Penyuluhan,
4. Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit,
5. Penanganan ijazah jika diperlukan,
6. Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan,
7. Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

Standar Jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dilaksanakan diluar fasilitas kesehatan dan didalam fasilitas layanan kesehatan, diluar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (sesuai SK Dinkes Provinsi) yang terdiri dari :

- ❖ Dokter,

- ❖ Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi,
- ❖ Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan,
- ❖ Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi,
- ❖ Tenaga laboratorium,
- ❖ Tenaga penyuluh/promosi Kesehatan,
- ❖ Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi,
- ❖ Di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari dokter (umum dan spesialis), perawat, petugas radiologi, petugas laboratorium dan lain-lain.

Tabel 4.8

Capaian Indikator Kinerja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Capaian Kinerja

Definisi operasional adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

$$\text{Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi} = \frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$$

- a. Sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan

Tabel 4.9

Tempat Wadah Limbah Infeksius untuk Mencegah Penularan

No.	Jenis	Jumlah	Fungsi
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Sesuai dengan jumlah petugas yang turun lapangan dan kontak kasus	Melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit

No.	Jenis	Jumlah	Fungsi
2	Profilkasis/Vitamin/Obat Vaksin	Sesuai jumlah kontak kasus dan populasi berisiko	Diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit
3	Alat Pemeriksaa fisil	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana
4	Alat dan Bahan pengambilan specimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis penyakit	Sesuai jumlah kontak dekat kasus	Untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium
5	Wadah Pengiriman Spesimen (Spesimen Carrier)	Sesuai Kebutuhan	Untuk membawa specimen dari lokasi ke laboratorium
6	Tempat sampah biologis	Sesuai kebutuhan	Sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan
7	Formulir : Form Penyelidikan epidemiologi form/lemar KIE Alat Tulis yang diperlukan	1 Set	Untuk membantu melakukan investigasi kasus, kontak dan populasi berisiko serta factor risiko

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam melaksanakan layanan dasar Dinas Kesehatan menetapkan target pencapaian SPM yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023. Untuk lebih jelasnya target pencapaian SPM sesuai RPJMD digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan**

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RPJMD					Target SPM %
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pelayanan kesehatan berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel 4.11
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Provinsi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran dalam tahun	Target dalam tahun	Jumlah Absolut	%
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	9.312.019	100	33061	100

Tabel 4.12
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran dalam tahun	Target dalam tahun	Jumlah Absolut	%
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	6.039	100	6.039	100

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah Rp. 608.910.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 180.326.000.- (29,61%).

Adapun rincian per kegiatan :

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, yaitu :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana atau berpotensi Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 465.000.000.- realisasi keuangan Rp. 132.266.000.- (28.43%).

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, yaitu :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar biasa alokasi anggaran sebesar Rp. 143.910.000.- realisasinya Rp. 48.100.000.- (33.42%).

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM untuk Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, yaitu :

- a. ASN 4 orang
- b. Prambukti 7 orang
- c. DMT (Disaster Medical Tim) beranggotakan masing-masing RS Provinsi, UPK Pelayanan dan RS TNI Polri

Dan untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yaitu dukungan penentu kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans (Kadis, Kepala Puskesmas, Direktur RS)

- Pelaksanaan kegiatan penyelidikan/penanggulangan di lapangan, tenaga investigator telah di latih sebagai Tim Gerak Cepat (TGC) yang terdiri :
 - Dokter/Perawat sebanyak 24 orang
 - Petugas Laboratorium sebanyak 24 orang
 - District Surveillance Officer (DSO) sebanyak 24 orang kab/kota dan petugas provinsi sebanyak 10 orang
- Untuk pelaksanaan kegiatan lapangan diharapkan keterlibatan lintas sektor, pemerintah setempat, dan masyarakat.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Kurangnya dukungan Anggaran dalam kegiatan Pra dan Pasca krisis dan bencana.
- b. Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan krisis kesehatan dan bencana.
- c. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana (logistic) bencana/krisis Kesehatan.
- d. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.
- e. Permasalahan teknis pada pengisian laporan SPM dalam aplikasi e-SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual di lapangan.

Solusi

- a. Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektor dalam pelaksanaan program Kejadian Luar biasa,
- b. Belum dimanfaatkannya aplikasi Siscobikes,
- c. Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan program krisis Kesehatan,
- d. Krisis Kesehatan masih berorientasi pada fase saat terjadi krisis/penanggulangan, yang seharusnya diutamakan pada fase pra krisis atau mitigasi resiko terjadinya krisis Kesehatan,
- e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan terkait krisis kesehatan/kejadian bencana,
- f. Masih kurangnya SDM Kesehatan yang dilatih dalam kegiatan Krisis Kesehatan/Penanggulangan Bencana,
- g. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM yang menghadirkan Kementerian Kesehatan RI serta Biro Pemerintahan Setda Prov. Sulsel dan OPD pengampu agar dapat melihat kendala serta membantu memberikan solusi terkait indikator mutu layanan yang bermasalah,
- h. Perlu diadakan bimbingan teknis atau petunjuk teknis terkait indikator- indikator mutu layanan yang terdapat pada Peraturan Kementerian Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021,
- i. Perlu diadakan pengadaan logistic terkait pra krisis dan pasca bencana.

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM pada urusan pekerjaan umum di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum Regional Lintas Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan pekerjaan umum di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.13
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kab/Kota (20%)	Persentase pencapaian penerima layanan dasar air minum regional lintas kabupaten/kota	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (20%)	Persentase pencapaian penerima layanan dasar yang memperoleh akses pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota	100%

4.3.3. Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2023 pada Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.14
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR YANG TELAH DILAYANI (ORANG)	REALISASI
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kab/Kota (20%)	Persentase pencapaian penerima layanan dasar air minum regional lintas kabupaten/kota	100 %	121.000	121.000	100 %
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase pencapaian penerima layanan dasar yang	100 %	10	10	100 %

Regional Lintas Kab/Kota (20%)	memperoleh akses pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota				
--------------------------------	--	--	--	--	--

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM Tahun 2023 pada Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Program Sistem Pengelolaan Air Minum Regional Mamminasata	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000.000,-
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,-

4.3.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2023 pada urusan pekerjaan umum di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.16
Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum

JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
Kepala Dinas SDACKTR	Pembina Utama Madya, IV/d	1
Sekretaris Dinas	Pembina, IV/a	1
Kepala Cipta Karya	Pembina Tk.I, IV/b	1
Kepala Seksi Sanitasi, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Pembina, IV/a	1
Penata Layanan Operasional	Pembina, IV/a	1
Penata Layanan Operasional	Penata, III/d	1
Penata Layanan Operasional	Penata Muda Tk.I, III/b	1
Pengadministrasian Perkantoran	Penata Muda, III/a	1
Total		8

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Belum terjalinnya koordinasi secara intens dengan OPD terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota penyajian data dasar perhitungan SPM sehingga data

dasar belum sempurna.

Solusi

- a. Akan segera berkoordinasi dengan OPD Terkait, baik di provinsi maupun kab/kota,
- b. Melaksanakan pendataan pada kabupaten/kota dalam lingkup Mamminasata dan lintas kabupaten/kota lainnya.

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun target capaian SPM Perumahan Rakyat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar minimal yaitu 100 %.

Tabel 4.17
Capaian Target SPM Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	17 unit	17 unit		100 %

4.4.3. Realisasi

Capaian SPM Perumahan Rakyat seperti yang terlampir pada Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal yaitu 100%.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD sebesar Rp. 520.000.000,- , meliputi :

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebesar Rp. 520.000.000,-

4.4.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, yaitu:

- a. Dikoordinir oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi.
- b. Kepala Bidang Perumahan
- c. Jabatan Fungsional
- d. Seluruh staf ASN dan Non ASN Bidang Perumahan

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala

- a. Tidak adanya Program Pemerintah yang memungkinkan untuk melakukan relokasi bagi masyarakat sehingga untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Provinsi tidak terlaksana

Permasalahan

- a. Persyaratan Surat Keputusan (SK) Tanggap darurat dalam pemenuhan SPM menjadi kendala karena tidak setiap kejadian bencana harus disertai Surat Keputusan (SK) Tanggap darurat.
- b. Indikator dalam penentuan skala bencana tidak cukup jelas sehingga penanganan bencana tidak jelas siapa yang harus menangani.
- c. Keterbatasan anggaran dan pengalokasian anggaran yang belum efektif.

Solusi

- a. Membangun kolaborasi dan sinergi dengan BPBD provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan bencana termasuk pengambilan keputusan SK tanggap darurat yang menjadi kewenangan BPBD.
- b. Adanya aturan yang jelas dan mengikat oleh Pemerintah Pusat sehingga memudahkan dalam penanganan korban bencana.
- c. Mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya diantaranya dana CSR, DAK dan Bantuan Keuangan.

4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun Jenis Pelayanan Dasar terkait Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS).

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.18

Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1.	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100	2023	Satuan Polisi Pamong Praja

4.5.3. Realisasi

Tabel 4.19

Realisasi Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;	9	9	100%	0	0	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan Bidang

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar Rp 3,378,650,000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jenis Layanan Dasar warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah belum dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2023 di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 4.20
Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM
Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Anggaran (Rp)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100 %	Januari – Desember 2023	3,378,650,000,00

4.5.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 670 orang.

a. Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2023 adalah 632 Orang dengan status sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 147 Orang
- 2) Non Pegawai Negeri Sipil : 484 Orang
- 3) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 5 Orang
- 4) PPNS Unit Kerja lainnya : 34 Orang

b. Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan

Tabel 4.21
Tingkatan Pendidikan Status PNS

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	16 Orang
2	S1	65 Orang

No.	Pendidikan	Jumlah
3	D4	1 Orang
4	D3	3 Orang
5	SLTA	61 Orang
6	SLTP	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		147 Orang

Tabel 4.22
Kepangkatan/Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	I	1 Orang
2	II	55 Orang
3	III	77 Orang
4	IV	14 Orang
Jumlah Keseluruhan		147 Orang

c. Kualifikasi Jabatan

- Pejabat Struktural Eselon II : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III : 6 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV : 14 orang
- Staf (PNS) : 68 orang
- Staf (Non PNS) : 7 orang
- Petugas Lapangan SatPol PP (PNS) : 56 orang
- Petugas Lapangan SatPol PP(Non PNS) : 477 orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a. Kurang Optimalnya kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 karena terkendala Biaya Operasional Kegiatan;
- b. Efektifitas pelaksanaan kegiatan awal tahun dilaksanakan di bulan Maret;
- c. Belum optimalnya Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/ Instansi terkait;
- d. Belum terintegrasinya Program kerja antar daerah dengan instansi terkait, sehingga penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum belum maksimal.

Solusi

- a. Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan;

- b. Melaksanakan Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/Instansi terkait melalui Program kerja.;
- c. Menjalin koordinasi yang baik dan saling bersinergi antar daerah, instansi terkait jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kondusif.

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dalam 5 (lima) indikator pelayanan dasar yang akan dicapai secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan provinsi Sulawesi Selatan memiliki korelasi yang sangat jelas dengan 5 (lima) indikator SPM daerah provinsi yang akan dicapai secara bertahap, yang meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.23
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	2023	Dinas/ Instansi Sosial
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	2023	Dinas/ Instansi Sosial
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	2023	Dinas/ Instansi Sosial
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	2023	Dinas/ Instansi Sosial
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	2023	Dinas/ Instansi Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi			

4.6.3. Realisasi

Tabel 4.24

Realisasi Capaian Bidang Urusan Sosial

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN DASAR	CARA PERHITUNGAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI (%)	
1.	Program Rehabilitasi Sosial :				
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	$\frac{263}{263} \times 100\%$	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100	
	b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	$\frac{215}{215} \times 100\%$	2. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100	
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	$\frac{60}{60} \times 100\%$	3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	
	d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pegemis di Dalam Panti	$\frac{1.222}{1.222} \times 100\%$	4. Persentase (%) Gelandangan dan Pegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	
2.	Program Perlindungan dan Jaminan sosial :		5. Presentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Prov.	100	
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	$\frac{74.159}{74.159} \times 100\%$			

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1554/ XI /Tahun 2023, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) sebesar Rp. 49.981.924.673,- (Belanja Gaji & Tunjangan ASN sebesar Rp.37.661.005.116,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.12.320.919.557,-), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 48.841.805.695,- dengan Realisasi Belanja Gaji & Tunjangan ASN sebesar Rp. 37.562.351.610,- dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 11.279.454.085,- sedangkan tingkat capaiannya kinerja dari 5 Program, 15 Kegiatan dan 49 sub kegiatan sebesar 100 % dengan kategori sangat baik untuk Semester II Tahun 2023.

Tabel 4.25
Anggaran, Realisasi Belanja dan Realisasi Fisik Bidang Urusan Sosial

	Anggaran	Realisasi	Realisasi Fisik
APBD	Rp. 56.241.827.121,-	Rp. 53.789.429.644,-	100 %

Berikut merupakan anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM pada tahun 2023 di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel 4.26
Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM di Dinas Sosial

No.	Indikator	Anggaran (Rp.)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 0
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 1.401.315.550
3	Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 660.532.500
4	Presentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 0
5	Presentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi	Rp. 613.950.000

4.6.5. Dukungan Personil

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 324 orang ASN yang terbagi 169 (52,1%) laki-laki dan 155 (47,9%) perempuan serta 106 orang Non ASN. Adapun pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 33 pejabat struktural, 141 fungsional dan 84 staf pelaksana dengan rincian Kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :

- Program Doktoral = 0 orang
- Pasca Sarjana (S2) = 33 orang
- Sarjana (S1) = 178 orang

- D1-D3 sederajat = 11 orang
- SLTA/Sederajat = 97 orang
- SLTP/Sederajat = 4 orang
- SD = 1 orang

Selain itu, penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial juga didukung oleh beberapa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya seperti tagana sebanyak 1.143 dan tenaga pelopor sebanyak 56 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Tahun 2023 yang ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, hal yang dapat disimpulkan secara umum bahwa dilihat dari aspek kuantitas capaian target sangat memuaskan, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator mutu layanan yang masih perlu dipenuhi agar kualitas pelayanan sosial melampaui standar pelayanan minimal.

Permasalahan

- a. Adanya refocusing anggaran pada tahun 2023 sehingga pelayanan di Panti Anak (UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone dan UPT Nirannuang Bulukumba) dapat dilaksanakan hanya 1 angkatan.
- b. Masih Kurangnya tenaga Kesehatan yang di tempatkan di masing-masing UPT.
- c. Sulitnya berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penerapan SPM.
- d. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.

Solusi

- a. Menyampaikan kepada TAPD mengenai kondisi tersebut dan menganggarkan ulang pada tahun berikutnya.
- b. Mengusulkan pengangkatan ASN bidang Kesehatan di masing-masing UPT.
- c. Perlu diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan data dasar dalam penerapan SPM di daerah.
- d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM yang menghadirkan Kementerian Sosial RI serta Biro Pemerintahan Setda Prov. Sulsel agar dapat melihat kendala serta membantu memberikan solusi terkait indikator mutu layanan yang bermasalah.
- e. Perlu diadakan bimbingan teknis atau petunjuk teknis terkait indikator-indikator mutu layanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus
3. Program Pengembangan Kurikulum
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Provinsi
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
 - b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
6. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
 - a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana atau berpotensi Bencana
 - 2) Penguatan Tim Manajemen Krisis Kesehatan
 - Peningkatan Kapasitas Tim Manajemen Krisis Kesehatan Provinsi
2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar biasa

4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Sistem Pengelolaan Air Minum Regional Mamminasata
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

4.7.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 3. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

4. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
5. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 - Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

4.7.6. Bidang Urusan Sosial

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
2. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - c. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
4. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang mencakup Capaian kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, LPPD ini disusun guna memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD, LKPJ dan RLPPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Pemerintah Daerah, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaannya seluruh elemen dari semua sektor bergerak untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 khususnya pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar untuk beberapa Indikator mengalami peningkatan dengan capaian kinerja berada diatas rata-rata nasional yaitu **Urusan Pendidikan** Tingkat Partisipasi warga negara usia 16 sd 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah sebesar **90,51 %** standar nasional **83,82%**, **Urusan Kesehatan** yaitu Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi sebesar **86,04%** standar nasional **80,21%**, Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi sebesar **100%** sedangkan standar nasional **99,73%**, untuk **Urusan Pekerjaan Umum** Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi **64,17%** dan standar nasional **60,95%** untuk Rasio Kemantapan Jalan Provinsi **75,36%** dan standar nasional **72,91%**, **Urusan Perumahan Rakyat** , Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni **100%**, **Urusan Trantibunlinmas** Presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan **100%** dan standar nasional **98,99%**, Persentase Penegakan Perda dan Perkada **93,33%** standar nasional **83,14%** dan untuk **Urusan Sosial** Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti sebanyak **100%** dan standar nasional **91,76%**, Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi yaitu **100%** sedangkan standar nasional **96,83%**.

Capaian Makro Sulawesi Selatan Tahun 2023 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 sebesar 74,60 menunjukkan hasil yang baik dilihat dari indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 sebesar 72,82. Untuk *Angka Pengangguran* juga menunjukkan hasil yang baik pula yaitu pada Tahun 2022 sebesar 4,51 sedangkan di Tahun 2023 sebesar 4,33 menunjukkan turunnya angka pengangguran, Untuk Tahun 2023 Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,51, tingkat kemiskinan sebesar 8,70, Sedangkan *Pendapatan per Kapita* tidak mengalami perubahan sampai dengan kondisi Maret 2023 pada angka 65,59. dan yang terakhir yaitu *Ketimpangan Pendapatan* pada Tahun 2023 sebesar 0,377.

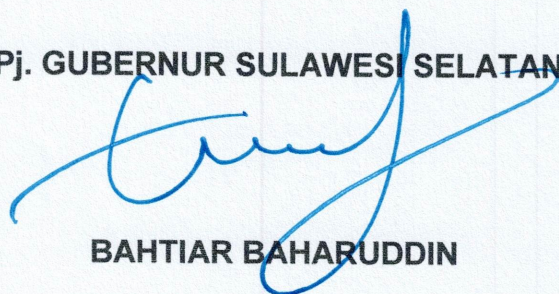
Pencapaian beberapa target pembangunan, tidak terlepas dari itikad baik, Kerja Keras, Kreatifitas dan Inovasi dari semua Pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas masing – masing, tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki melalui mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diharapkan akan mendapat perbaikan oleh Pemerintah Pusat.

Demikian Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diiringi dengan harapan semoga ditahun – tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan kerja keras kita bersama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala senantiasa memberikan Petunjuk, Rahmat dan KaruniaNya kepada kita sekalian, sekian dan terima kasih.

Wassalamu' alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, Maret 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 90222
Telp. 0411-453137 - Surel: inspektoratprovusulsel@gmail.com

PERYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam LPPD menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LPPD telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rancangan Akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Reviu terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini.

Makassar, 18 Maret 2024



MARWAN MANSYUR, SH., MH.

Penginspektoran Pembina Tk. I

NPWP 19730914 200003 1 005